

(PERIODE 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024



SAIFUL, S.Pd., M.Si
BUPATI KATINGAN

FIRDAUS, ST
WAKIL BUPATI KATINGAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Katingan Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi gambaran umum penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Katingan menyangkut Dasar Hukum (Undang – Undang Pembentukan Daerah), Visi Misi Kepala Daerah dan Data Umum Daerah meliputi Data Geografis Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Jumlah PNS, Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan, Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, berisi perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH, berisi capaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan, kebijakan strategis yang ditetapkan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN, berisi pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan dengan dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan Bantuan Luar Negeri.

BAB V PENUTUP

Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Katingan selama Tahun Anggaran 2024. Laporan ini



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten Katingan dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan, untuk itu berbagai kritik dan saran yang ada sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih menyempurnakan laporan ini khususnya dan akhirnya bagi kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Katingan.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Katingan yang telah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun daerah dan berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Katingan



Kasongan,

Maret 2025

BUPATI KATINGAN

SAIFUL



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Hukum	4
1.2 Visi dan Misi	4
1.2.1 Visi.....	4
1.2.2 Misi.....	7
1.3 Data Umum Daerah.....	9
1.3.1 Data Deografis Wilayah.....	9
1.3.2 Jumlah Penduduk.....	14
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk.....	16
1.3.4 Jumlah PNS.....	17
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	19
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	22
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	30
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran)	
2.1 Perubahan Pendapatan Daerah	1
2.2 Perubahan Belanja Daerah.....	1
2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah.....	3
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	1
3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	1
3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing – Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan	12
A. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ...	16
B. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan ... Dasar	46
C. Pelaksanaan Urusan Pilihan	76
D. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	83
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	110
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	118
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.....	1
BAB V PENUTUP	1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Katingan Per Kecamatan	I - 10
Tabel 1.2	Daftar Nama Kecamatan dan Desa / Kelurahan se Kabupaten Katingan	I - 11
Tabel 1.3	Jumlah penduduk Kabupaten Katingan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	I - 15
Tabel 1.4	Jumlah penduduk Kabupaten Katingan berdasarkan luas wilayah, laju pertumbuhan dan persentase penduduk Tahun 2024	I - 16
Tabel 1.5	Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan Berdasarkan Unit Organisasi dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024	I - 17
Tabel 1.6	Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024.....	I - 18
Tabel 1.7	Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan Berdasarkan Tingkat Golongan, Ruang dan Eselon Per 31 Desember 2024	I - 19
Tabel 1.8	Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024	I - 21
Tabel 1.9	Rincian Pengeluaran Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024	I - 24
Tabel 1.10	Rincian Belanja Urusan Wajib Kabupaten Katingan Tahun 2024	I - 25
Tabel 1.11	Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024	I - 30
Tabel 2.1	Rincian Perubahan Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Katingan Tahun 2024	II - 4
Tabel 3.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Katingan Tahun 2024.....	III - 2
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024	III - 5
Tabel 3.3	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	III-15
Tabel 3.4	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-46
Tabel 3.5	Pelaksanaan Urusan Pilihan	III-76
Tabel 3.6	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	III-83
Tabel 3.7	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.....	III-111
Tabel 3.8	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024.....	III-118
Tabel 4.1	Laporan Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR) Kabupaten Katingan	IV-1



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Katingan Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional Bupati Katingan selaku Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara teknis penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Katingan Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan ruang lingkup meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Katingan merupakan progress laporan pencapaian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, oleh karena itu LKPJ yang disusun memiliki makna yang strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan atas program yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Katingan Tahun Anggaran 2024 ini, merupakan hasil dari kinerja masing-masing Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Katingan. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Katingan Tahun Anggaran 2024 ini memberikan penegasan atas pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 terhadap Indikator yang termuat dalam Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dan rencana kerja dari masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024. Untuk itulah maka



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Katingan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76).



1.1 Dasar Hukum

Kabupaten Katingan merupakan salah satu Kabupaten dari 13 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Katingan beribukota di Kasongan dan merayakan Hari Jadi setiap tanggal 20 Juli dan Kabupaten Katingan terdiri atas 13 kecamatan, 7 kelurahan dan 154 desa.

1.2 Visi dan Misi

Periode Kepemimpinan Bupati Terpilih dimulai tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2023 selanjutnya pada tahun 2024 Kabupaten Katingan dipimpin oleh Penjabat Bupati. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Katingan merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang melalui pendekatan visi dan misi RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025.

1.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Katingan periode tahun 2024-2026 merupakan bagian dari pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 pada periode/tahap keempat dan pedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap keempat RPJPD tersebut, maka akan disusun tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.



Adapun visi pembangunan daerah sesuai RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 adalah :

"KABUPATEN KATINGAN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA"

Dimaksudkan dengan Kabupaten Katingan yang maju, didasarkan beberapa ukuran, yaitu:

1. Ditinjau dari aspek ekonomi, kemajuan dapat diukur dari:
 - a) Tingkat pendapatan yang tinggi dan pembagiannya yang relative merata.
 - b) Peran sektor industri pengolahan terutama pengolahan hasil-hasil pertanian sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja.
 - c) Dalam proses produksi, berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa;
 - d) Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi;
 - e) Perekonomiannya stabil sehingga gejolak yang berasal dari dalam maupun luar dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.
2. Tingkat kemajuan masyarakat Kabupaten Katingan juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial dan politik, yaitu:
 - a) Makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.
 - b) Laju pertumbuhan penduduk yang sesuai dengan daya dukung wilayah.
 - c) Angka harapan hidup yang lebih tinggi;
 - d) Kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.
 - e) Memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap.
 - f) Peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan.
 - g) Tersedianya infrastruktur dasar dan fisik yang semakin maju.



Kabupaten Katingan yang dibangun bukan hanya yang maju, tetapi juga mandiri. Langkah awal kemandirian dalam konteks Kabupaten Katingan dapat diterjemahkan sebagai keberhasilan pemekaran wilayah. Oleh karena itu, pembangunan sebagai upaya mengisi pemekaran haruslah merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Karena itu membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi dan pemerataannya. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

3. Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada :
- Ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; Masyarakat yang maju, mandiri berarti juga masyarakat yang produktif dan inovatif, yang tercermin dalam sikap profesional, disiplin, etos kerja tinggi, serta mampu menyesuaikan diri secara bertahap terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai budaya setempat.
 - Pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah semakin meningkat, sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar menjadi cenderung semakin berkurang;
 - Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.
 - Apabila karena SDA tidak lagi memungkinkan, telah dipersiapkan keunggulan lain, sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan.
 - Daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial ekonomi nasional maupun global.

Pembangunan Kabupaten Katingan tidak cukup hanya menuju masyarakat yang mandiri dan maju, melainkan juga masyarakat yang Adil dan Sejahtera.

Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari



rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan dan pemerataan merupakan ciri yang harus ditonjolkan dalam pembangunan Kabupaten Katingan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; peduli terhadap keamanan masyarakat dan lingkungan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, masyarakat yang berkeadilan berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Dimaksud dengan “Sejahtera” yaitu secara materil terpenuhi melalui pertumbuhan (ekonomi) yang terus meningkat diikuti peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, rasa aman masyarakat serta diimbangi dengan pemerataan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik.

1.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Katingan, maka telah ditetapkan 6 (enam) misi sebagaimana di dalam RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mengutamakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Dengan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi yang diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di sektor-sektor yang lain.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pendidikan yang terencana agar tercipta produktivitas penduduk yang tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan yang semakin meningkat. Pembangunan Sumber Daya Manusia disamping meningkatkan kompetensi (knowledge, skill, attitude) juga meningkatkan derajat kesehatan, dan pendapatan per kapita riil. Adanya



peningkatan kualitas SDM sebagai cerminan kemampuan penguasaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3. Membuka isolasi daerah melalui Pembangunan Infrastruktur sehingga terjamin kelancaran arus barang, manusia, modal dan informasi dari dan ke Kabupaten Katingan secara cepat dan murah. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur: jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, dan permukiman, listrik dan air bersih, penerbangan perintis (baik untuk pertahanan/keamanan dan umum/business), akan tercipta daya tarik yang semakin tinggi bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Katingan.
4. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya (termasuk kemitraan sosial dan kesetiakawanan sosial), Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Katingan yang bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan harkat, martabat, dan harga diri, serta bercitra baik (kreatif, inovatif, rajin) dan menekan gangguan keamanan, menstabilkan kondisi sosial politik melalui Penegakkan Hukum, Keamanan dan Ketertiban menuju tercipta Kabupaten Katingan yang aman damai dan bersatu, sesuai motto Penyang Hinje Simpei.
5. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara bijaksana, menstabilkan keseimbangan ekosistem, menghemat penggunaan SDA, menghentikan pemborosan penggunaan berbagai sumber daya, menghentikan kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pembangunan Kabupaten Katingan yang berkelanjutan.
6. Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan bersih.



1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Katingan terletak diantara $112^{\circ}00'$ BT – $0^{\circ} 20'$ LS dan $113^{\circ} 45'$ BT – $3^{\circ}30'$ LS, secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Gunung Mas; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.

Wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi strategis dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, yaitu:

- Terletak di jalan trans Kalimantan, sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Katingan pada masa yang akan datang.
- Kabupaten Katingan yang secara geografis berbatasan dengan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah penyangga atau *hinterland* bagi pengembangan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
- Implikasi tidak langsung mengakibatkan Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan, menjadi wilayah yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi pola dan jalur pergerakan kegiatan penduduk menuju ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan dilihat secara topografi Kabupaten Katingan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

- Bagian Selatan merupakan daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut, dengan ketinggian 0 - 50 m dari permukaan laut;
- Bagian Tengah merupakan dataran dengan ketinggian 50 – 200 m dari permukaan laut; dan
- Bagian Utara merupakan perbukitan dengan ketinggian 200 – 1.500 m dari permukaan laut.



Secara hidrologi Kabupaten Katingan dialiri oleh sungai besar yang membentang dan mengalir dari Utara ke Selatan yang berakhir di laut Jawa dengan panjang yang dapat dilayari ± 650 Km dengan anak-anak Sungai Katingan yang dapat dilayari adalah :

- a. Sungai Kalanaman, dengan panjang ± 35 Km;
- b. Sungai Samba, dengan panjang ± 100 Km;
- c. Sungai Hiran, dengan panjang ± 75 Km;
- d. Sungai Bemban, dengan panjang ± 18 Km;
- e. Sungai Sanamang, dengan panjang ± 23 Km;
- f. Sungai Mahop, dengan panjang ± 13 Km;
- g. Sungai Bulan, dengan panjang ± 29 Km;
- h. Sungai Kamipang, dengan panjang ± 12 Km; dan

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Katingan terbagi menjadi 13 Kecamatan, 154 Desa dan 7 Kelurahan dengan luas wilayah Kabupaten Katingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 sebesar 17.500 km² atau 1.750.000 ha, sedangkan berdasarkan perkembangan tata batas wilayah sampai Tahun 2020 luas Kabupaten Katingan menjadi 20.393,69 km² atau 20.393.690 ha dengan luas wilayah per Kecamatan, sebagaimana berikut ini :

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kabupaten Katingan Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Desa	Jumlah Kel	Luas wilayah	
					Km2	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Katingan Kuala	Pegatan	14	2	1.483,71	7,28
2	Mendawai	Mendawai	7	-	2.392,06	11,73
3	Kamipang	Baun Bango	9	-	2.854,34	14,00
4	Tasik Payawan	Petak Bahandang	8	-	808,26	3,96
5	Katingan Hilir	Kasongan	6	2	665,80	3,62
6	Tewang S. Garing	Pendahara	9	1	900,34	4,41
7	Pulau Malan	Buntut Bali	14	-	649,30	3,18
8	Katingan Tengah	Tumbang Samba	15	1	1.635,47	8,02
9	Sanaman Mantikei	Tumbang Kaman	14	-	1.413,48	6,93
10	Petak Malai	Tumbang Baraoi	7	-	2.997,93	14,70
11	Marikit	Tumbang Hiran	18	-	2.123,48	10,41
12	Katingan Hulu	Tumbang Sanamang	22	1	1.475,30	7,23
13	Bukit Raya	Tumbang Kajamei	11	-	994,22	4,88
TOTAL			154	7	20.393,69	100

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Katingan, Tahun 2024



Kabupaten Katingan terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan, 154 desa dan 7 kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Nama Kecamatan dan Desa / Kelurahan se Kabupaten Katingan

1	Kecamatan	Kelurahan	Desa
2	3	4	
1	Kecamatan Katingan Kuala	1. Pegatan Hilir 2. Pegatan Hulu	1. Jaya Makmur 2. Subur Indah 3. Kampung Keramat 4. Singam Raya 5. Bangun Jaya 6. Kampung Tengah 7. Kampung Baru 8. Setia Mulia 9. Sebangau Jaya 10. Sungai Kaki 11. Selat Baning 12. Makmur Utama 13. Bumi Subur 14. Bakung Raya
2.	Kecamatan Mendawai	-	1. Telok Sebulu 2. Mendawai 3. Kampung Melayu 4. Tewang Kampung 5. Mekar Tani 6. Parigi 7. Tumbang Bulan
3.	Kecamatan Kamipang	-	1. Galinggang 2. Tampelas 3. Telaga 4. Perupuk 5. Karuing 6. Jahanjang 7. Tumbang Runen 8. Baun Bango 9. Asem Kumbang
4.	Kecamatan Tasik Payawan	-	1. Talingke 2. Hiyang Bana 3. Petak Bahandang 4. Handiwung 5. Tumbang Panggo 6. Tewang Tampang 7. Luwuk Kanan 8. Luwuk Kiri
5.	Kecamatan Katingan Hilir	1. Kasongan Baru	1. Tewang Kadamba



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

1	Kecamatan	Kelurahan	Desa
2	3	4	
		2. Kasongan Lama	2. Tumbang Liting
			3. Talian Kereng
			4. Banut Kalanaman
			5. Telangkah
			6. Hampalit
6.	Kecamatan T. Sangalang Garing	1. Pendahara	1. Tewang Beringin
			2. Hapalam
			3. Tewang Rangsang
			4. Bangkuang
			5. Tarusan Danum
			6. Tumbang Tarusan
			7. Tewang Rangkang
			8. Tewang Menyangen
			9. Karya Unggang
7.	Kecamatan Pulau Malan		1. Tewang Papari
			2. Tewang Derayu
			3. Buntut Bali
			4. Kuluk Bali
			5. Manduing Taheta
			6. Manduing Lama
			7. Tumbang Banjang
			8. Tumbang Lawang
			9. Dahian Tunggal
			10. Tewang Karang
			11. Tumbang Tungku
			12. Geragu
			13. Tumbang Tanjung
			14. Tura
8.	Kecamatan Katingan Tengah	1. Samba Kahayan	1. Mirah Kalanaman
			2. Tumbang Lahang
			3. Tewang Panjang
			4. Petak Puti
			5. Telok
			6. Samba Danum
			7. Samba Bakumpai
			8. Samba Katung
			9. Napu Sahur
			10. Batu Badinding
			11. Rantau Asem
			12. Tumbang Kalemei
			13. Tumbang Marak
			14. Tumbang Hangei
			15. Tumbang Pariyei
9.	Kecamatan Sanaman Mantikei	-	1. Dehes
			2. Tumbang Labehu
			3. Tumbang Kaman



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

1	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	2	3	4
			4. Tumbang Manggu 5. Kamanto 6. Kuluk Habuhus 7. Tumbang Kanei 8. Tumbang Taranei 9. Tumbang Kawei 10. Tumbang Manggara 11. Tumbang Pangka 12. Tumbang Atei 13. Daya Manunggal 14. Rantau Bangkian
10.	Kecamatan Marikit	-	1. Rantau Mandurei 2. Tumbang Paku 3. Buntut Leleng 4. Kuluk Leleng 5. Rangan Surai 6. Tumbang Hiran 7. Tumbang Pahanei 8. Tumbang Dakei 9. Rangan Burih 10. Tumbang Bemban 11. Tumbang Lambi 12. Rangan Tangko 13. Tumbang Taei 14. Tumbang Malawan 15. Sabaung 16. Tumbang Tundu 17. Tumbang Tabulus 18. Batu Panahan
11.	Kecamatan Katingan Hulu	1. Tumbang Sanamang	1. Rangan Ranjing 2. Tumbang Labaning 3. Batu Bango 4. Penda Tanggaring Lama 5. Penda Tanggaring baru 6. Tumbang Hangei II 7. Tumbang Jiga 8. Tumbang Kabayan 9. Sei Nanjan 10. Rantau Bahai 11. Rantau Puka 12. Teluk Tampang 13. Tumbang Salaman 14. Tumbang Kuai 15. Kuluk Sapangi 16. Dehes Asem



1	Kecamatan	Kelurahan	Desa
2	3	4	
			17. Rangan Kawit
			18. Kiham Batang
			19. Tumbang Mangketai
			20. Tumbang Manangei
			21. Tumbang Mahop
			22. Tumbang Sabetung
12.	Kecamatan Petak Malai	-	1. Tumbang Baraoi
			2. Batu Tukan
			3. Tumbang Tangoi
			4. Tumbang Jala
			5. Batu Badak
			6. Nusa Kutau
			7. Tumbang Habangoi
13.	Kecamatan Bukit Raya		1. Tumbang Kataei
			2. Tumbang Dahuei
			3. Rantau Pandan
			4. Tumbang Gaei
			5. Penda Nange
			6. Rangan Rondan
			7. Rangan Bahekan
			8. Tumbang Kajamei
			9. Tumbang Karuei
			10. Tanjung Batik
			11. Tumbang Kaburai

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Katingan, Tahun 2024

1.3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Katingan Tahun 2024 berjumlah 181.963 jiwa. Distribusi penduduk per kecamatan pada Tahun 2024, Kecamatan Katingan Hilir, Katingan Tengah, dan Katingan Kuala masih merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak. Sementara Kecamatan Petak Malai, Bukit Raya, dan Mendawai merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Secara umum di semua Kecamatan, jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Berikut gambaran jumlah penduduk Kabupaten Katingan.



Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Katingan
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	0-4	6.322	5.755	12.077
2	5-9	8.833	8.274	17.107
3	10-14	9.299	8.654	17.953
4	15-19	8.358	8.204	16.562
5	20-24	8.315	8.012	16.327
6	25-29	7.497	6.905	14.402
7	30-34	7.416	7.001	14.417
8	35-39	7.472	7.016	14.488
9	40-44	7.654	6.956	14.610
10	45-49	6.668	5.870	12.538
11	50-54	5.520	4.706	10.226
12	55-59	4.253	3.619	7.872
13	60-64	2.802	2.467	5.269
14	65-69	1.742	1.761	3.503
15	70-74	1.140	1.164	2.304
16	>=75	1.110	1.198	2.308
	JUMLAH	94.401	87.562	181.963

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Katingan, Tahun 2024

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Berikut gambaran jumlah penduduk Kabupaten Katingan berdasarkan luas wilayah dan kepadatan penduduk orang/Km².

Jumlah penduduk berdasarkan luas wilayah, laju pertumbuhan dan persentase penduduk Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :



Tabel 1.4
Jumlah penduduk Kabupaten Katingan
berdasarkan luas wilayah, laju pertumbuhan dan persentase penduduk Tahun 2024

Kecamatan	Luas wilayah		Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2024	Persentase Penduduk
	Km2	%			
1	2	3	4	5	6
KAMIPANG	2.854,34	14,00	7.721	0,4	4,24
KATINGAN HILIR	665,8	3,26	44.790	0,86	24,61
TEWANG SANGALANG GARING	900,34	4,41	15.059	0,51	8,28
PULAU MALAN	649,3	3,18	11.612	0,33	6,38
KATINGAN TENGAH	1.635,47	8,02	31.094	0,4	17,09
SANAMAN MANTIKEI	1.413,48	6,93	12.328	1,03	6,78
MARIKIT	2.123,48	10,41	7.891	0,54	4,34
KATINGAN HULU	1.475,30	7,23	9.367	0,77	5,15
MENDAWAI	2.392,06	11,73	4.732	0,39	2,6
KATINGAN KUALA	1.483,71	7,28	20.303	0,05	11,16
TASIK PAYAWAN	808,26	3,96	8.992	0,45	4,94
PETAK MALAI	2.997,93	14,70	4.012	0,6	2,2
BUKIT RAYA	994,22	4,88	4.062	0,54	2,23
Jumlah	20.393,69	100,00	181.963	0,56	100

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Katingan, Tahun 2024

1.3.4 Jumlah PNS

Pemerintah Kabupaten Katingan melaksanakan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tahun 2019, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, baik yang menyangkut tipologi maupun adanya penggabungan terhadap beberapa Perangkat Daerah. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Katingan terdiri dari Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta didukung oleh perangkat daerah, yang meliputi 2 (dua) Sekretariat, 16 (enam belas) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta 2 (dua) UPT RSUD. Adanya perubahan tersebut berdampak pula pada perubahan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah dan Staf ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.



Untuk data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan berdasarkan Unit Organisasi dan Jenis Kelamin serta Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan
Berdasarkan Unit Organisasi dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat Daerah	51	49	100
2	Sekretariat DPRD	12	10	22
3	Inspektorat	31	10	41
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	9	22
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	3	12
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21	16	37
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	3	21
8	Badan Pendapatan Daerah	17	8	25
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17	11	28
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	14	11	25
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	11	20
12	Dinas Kesehatan	158	415	573
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	59	37	96
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	16	8	24
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	18	3	21
16	Dinas Lingkungan Hidup	20	12	32
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36	6	42
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16	10	26
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	27	37
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	4	17
21	Dinas Pendidikan	638	974	1612
22	Dinas Perhubungan dan Perikanan	20	5	25
23	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13	9	22



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
24	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	22	6	28
25	Dinas Sosial	9	8	17
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	43	4	47
27	UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan	46	125	171
28	UPT RSUD Pratama	5	14	19
29	Kecamatan Bukit Raya	9	0	9
30	Kecamatan Kamipang	12	4	16
31	Kecamatan Katingan Hilir	21	11	32
32	Kecamatan Katingan Hulu	18	4	22
33	Kecamatan Katingan Kuala	12	4	16
34	Kecamatan Katingan Tengah	16	3	19
35	Kecamatan Marikit	11	2	13
36	Kecamatan Mendawai	9	3	12
37	Kecamatan Petak Malai	6	0	6
38	Kecamatan Pulau Malan	11	5	16
39	Kecamatan Sanaman Mantikei	10	5	15
40	Kecamatan Tasik Payawan	8	4	12
41	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	13	8	21
TOTAL		1510	1861	3371

Sumber : BKPSDM Kabupaten Katingan, Tahun 2024

Tabel 1.6
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024

PENDIDIKAN		JENIS KELAMIN		GRAND TOTAL	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
SARJANA	S.3	1	0	1	2468
	S.2	61	62	123	
	S.1	1028	1255	2283	
	D.4	12	49	61	
DIPLOMA / SARJANA MUDA	D.3	158	404	562	587
	D.2	9	13	22	
	D.1	0	3	3	



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PENDIDIKAN		JENIS KELAMIN		GRAND TOTAL	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
	SLTA	230	74	304	304
	SLTP	7	1	8	8
	SD	4	0	4	4
Grand Total		1510	1861	3371	

Sumber : BKPSDM Kabupaten Katingan, Tahun 2024

Untuk data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan eselon dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.7
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan
Berdasarkan Tingkat Golongan Ruang dan Eselon Per 31 Desember 2024

Gol Ruang		Jabatan Eselon / Pejabat Struktural						Fungsiona I Tertentu	Pelaksana (Fungsional Umum)	Grand Total
		Eselon II.a	Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon III.b	Eselon IV.a	Eselon IV.b			
GOL. IV	IV/d	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	IV/c	0	19	0	0	0	0	9	0	28
	IV/b	0	8	23	1	0	0	300	0	332
	IV/a	0	0	21	59	4	0	274	7	365
GOL. III	III/d	0	0	0	34	103	1	646	58	842
	III/c	0	0	0	1	64	18	361	91	535
	III/b	0	0	0	0	8	17	520	81	626
	III/a	0	0	0	0	0	2	131	148	281
GOL. II	II/d	0	0	0	0	0	0	145	66	211
	II/c	0	0	0	0	0	0	29	62	91
	II/b	0	0	0	0	0	0	11	18	29
	II/a	0	0	0	0	0	0	17	8	25
GOL. I	I/d	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	I/c	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grand Total		1	27	44	95	179	38	2443	544	3371

Sumber : BKPSDM Kabupaten Katingan, Tahun 2024

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.
- Pendapatan Transfer, meliputi : Transfer Pemerintah Pusat; dan Transfer Antar Daerah.



- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; dana darurat; dan/atau Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran umum pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2024, sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Katingan diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru, kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Katingan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada peraturan daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud dengan arah pengelolaan pendapatan daerah di masa depan, difokuskan pada langkah-langkah berikut :

- 1) Pemanfaatan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- 5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
- 6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
- 7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah
- 8) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- 9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi terkait.

2. Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah :



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- 1) Peningkatan akurasi data potensi Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam.
- 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam hal pelaksanaan pendapatan daerah sebagai sarana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara kumulatif Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp.1.670.124.076.534,00** terealisasi sebesar **Rp.1.585.130.487.628,46** atau **94,91%**. Selengkapnya rincian target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.8
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	1.670.124.076.534,00	1.585.130.487.628,46	94,91
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.959.495.534,00	68.100.042.488,46	57,73
	Pendapatan Pajak Daerah	49.876.586.982,00	22.060.219.369,80	44,23
	Pendapatan Retribusi Daerah	6.556.973.058,00	8.131.580.489,00	124,01
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.192.215.980,00	4.579.510.360,83	22,68
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.333.719.514,00	33.328.732.268,83	80,63
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.552.114.581.000,00	1.508.968.514.600,00	97,22
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	1.488.910.581.000,00	1.456.801.628.468,00	97,84
	Dana Perimbangan	1.350.006.016.000,00	1.317.897.063.468,00	97,62
	Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal	5.890.545.000,00	5.890.545.000,00	100,00
	Dana Desa (DD)	133.014.020.000,00	133.014.020.000,00	100,00



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
	Pendapatan Transfer Antar Daerah :	63.204.000.000,00	52.166.886.132,00	82,54
	Pendapatan Bagi Hasil	63.204.000.000,00	52.166.886.132,00	82,54
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	50.000.000,00	8.061.930.540,00	16.123,86
	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	378.281.230,00	756,56
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.683.649.310,00	0,00

Sumber : BKAD dan Bapenda Kabupaten Katingan Tahun 2024

1.3.6 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah, terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai (termasuk Tambahan Penghasilan); Belanja Subsidi, Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintahan Desa dan Partai Politik; Belanja Tak Terduga.
- Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Modal.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro kedalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan setahun ke depan, sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel, selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Katingan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Efisiensi dan efektivitas anggaran;
- Prioritas;



- c. Tolak ukur dan target kinerja;
- d. Optimalisasi belanja langsung;
- e. Transparan dan Akuntabel.

Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/ instansi terkait didukung unit-unit kerja terkait. Peningkatan sarana dan infrastruktur yang terus menerus dilaksanakan diharapkan semakin dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Katingan sudah mulai meningkat dan diapresiasi oleh investor yang terlihat dari semakin besarnya investasi yang ditanamkan di Kabupaten Katingan.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan kondisi riil, baik dari sisi pendapatan (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah), sisi belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) dan sisi pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan). Disamping itu, juga memperhatikan perkembangan dari tahun ke tahun besaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan maupun dana yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan pengeluaran keuangan daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024, dimana rencana anggaran belanja daerah dialokasikan sebesar **Rp.1.726.720.071.534,00** terealisasi sebesar **Rp. 1.398.955.542.636,69** atau sebesar **81,02%**.



Tabel 1.9
Rincian Pengeluaran Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	1,726,720,071,534.00	1,398,955,542,636.69	81.02
BELANJA OPERASI	1,103,509,571,207.18	929,461,197,192.75	84.23
Belanja Pegawai	579,390,704,751.00	505,590,161,230.58	87.26
Belanja Barang dan Jasa	412,475,281,252.78	349,966,084,925.17	84.85
Belanja Subsidi	2,680,150,000.00	2,536,412,800.00	94.64
Belanja Hibah	105,685,085,505.40	68,842,688,548.00	65.14
Belanja Bantuan Sosial	3,278,349,698.00	2,525,849,689.00	77.05
BELANJA MODAL	387,781,730,490.82	373,741,292,966.24	96.38
Belanja Modal Tanah	1,500,000,000.00	1,478,500,000.00	70.86
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112,913,340,540.54	106,160,523,574.80	94.02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162,045,369,748.00	160,277,154,014.83	98.91
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	110,735,899,202.28	105,242,194,176.61	95.04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	236,331,000.00	235,131,200.00	99.49
Belanja Modal Aset Lainnya	350,790,000.00	347,790,000.00	99.14
BELANJA TIDAK TERDUGA	8,232,227,250.00	1,605,409,963.00	19.50
Belanja Tidak Terduga	8,232,227,250.00	1,605,409,963.00	19.50
BELANJA TRANSFER	227,196,542,586.00	94,147,642,514.70	41.44
Belanja Bagi Hasil	6,481,006,786.00	6,446,126,714.70	96.46
Belanja Bantuan Keuangan	220,715,535,800.00	87,701,515,800.00	39.74
SURPLUS / (DEFISIT)	(56,595,995,000.00)	73,848,965,556.18	(130.48)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56,595,995,000.00	0.00	0.00



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	56,595,995,000.00	0.00	0.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	73,848,965,556.18	0.00

Sumber : BKAD Kab. Katingan Tahun 2024 (data sementara / unaudited)

Ringkasan anggaran, realisasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan fungsi Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 1.726.720.071.534,00** realisasi sebesar **Rp. 1.398.949.757.838,69** atau **81,02 %** dengan uraian belanja masing-masing pelaksanaan urusan pemerintahan dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 1.10
Rincian Belanja Urusan Wajib Kabupaten Katingan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
TOTAL BELANJA DAERAH		1.726.720.071.534	1.398.949.757.838,69	81,02
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.034.221.616.429	893.267.976.135,39	86,37
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	443.128.029.132	347.267.212.477,51	78,37
	Dinas Pendidikan	443.128.029.132	347.267.212.477,51	78,37
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	369.060.754.700	336.667.932.262,97	91,22
	Dinas Kesehatan	258.324.067.117	255.143.124.813,00	98,77
	RSUD Mas Amsyar	49.357.051.399	47.033.699.564,00	95,29
	BLUD RSUD Mas Amsyar	27.988.268.537	27.038.671.451,96	96,61
	UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan I	1.767.502.100	167.057.077,00	9,45
	UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan II	1.666.009.655	155.525.638,00	9,34
	UPTD Kecamatan Mendawai Puskesmas Mendawai	1.508.270.000,00	153.282.054,00	10,16
	UPTD Kecamatan Kamipang Puskesmas Baun Bango	1.488.244.497	169.322.536,00	11,38
	UPTD Kecamatan Tasik Payawan Puskesmas Petak Bahandang	1.360.478.644	160.588.464,00	11,80
	UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan	1.528.219.202	160.664.350,00	10,51
	UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan II	1.443.839.952	137.873.784,00	9,55
	UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kereng	1.865.462.450	134.974.432,00	7,24



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Pangi			
	UPTD Kecamatan Tewang Sangalang Garing Puskesmas Pendahara	1.637.600.000	167.312.946,00	10,22
	UPTD Kecamatan Pulau Malan Puskesmas Buntut Bali	1.671.856.974	187.819.044,00	11,23
	UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba	2.346.597.002	236.600.640,00	10,08
	UPTD Kecamatan Sanaman Mantikei Puskesmas Tumbang Kaman	2.027.305.728	173.736.234,00	8,57
	UPTD Kecamatan Marikit Puskesmas Tumbang Hiran	1.726.231.100	176.915.008,00	10,25
	UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi	1.437.000.000	158.796.935,00	11,05
	UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang	1.650.171.098	191.769.650,00	11,62
	UPTD Kecamatan Bukit Raya Puskesmas Tumbang Kajamei	1.094.198.999	167.399.859,00	15,30
	RSUD Pratama Tumbang Samba	7.172.380.239	4.752.797.783,00	66,27
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	134.565.352.446	127.691.397.298,91	94,89
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134.565.352.446	127.691.397.298,91	94,89
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.317.272.736	32.473.452.752,00	94,63
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	34.317.272.736	32.473.452.752,00	94,63
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	43.587.271.215	41.310.748.356,00	94,78
	Satuan Polisi Pamong Praja	33.818.703.808	33.109.895.323,00	97,90
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.768.567.407	8.200.853.033,00	83,95
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	9.562.936.200	7.857.232.988,00	82,16
	Dinas Sosial	9.562.936.200	7.857.232.988,00	82,16
B.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	112.801.960.475	104.127.599.682,97	92,31
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	8.775.486.656,00	7.636.901.854,00	87,03
	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8.775.486.656,00	7.636.901.854,00	87,03
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.280.662.824	7.958.240.784,00	96,11



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.280.662.824	7.958.240.784,00	96,11
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	694.792.474	560.993.139,00	80,74
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	694.792.474	560.993.139,00	80,74
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1.135.000.000	1.056.739.659,00	93,10
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.135.000.000	1.056.739.659,00	93,10
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	18.542.066.160	17.655.044.143,00	95,22
	Dinas Lingkungan Hidup	18.542.066.160	17.655.044.143,00	95,22
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.567.942.527	7.383.448.057,00	97,56
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.567.942.527	7.383.448.057,00	97,56
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.581.780.376	8.274.767.939,97	96,42
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.581.780.376	8.274.767.939,97	96,42
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.973.303.000	3.527.913.036,00	70,94
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.973.303.000	3.527.913.036,00	70,94
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	8.053.944.112	7.594.012.014,00	94,29
	Dinas Perhubungan dan Perikanan	8.053.944.112	7.594.012.014,00	94,29
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	11.149.168.095	10.876.625.558,00	97,56
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.149.168.095	10.876.625.558,00	97,56
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.437.236.257	6.214.288.842,00	83,56
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	7.437.236.257	6.214.288.842,00	83,56
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	9.928.313.412	8.914.102.264,00	89,78
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.928.313.412	8.914.102.264,00	89,78
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan	7.116.220.000	6.902.740.184,00	97,00



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Olahraga			
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.116.220.000	6.902.740.184,00	97,00
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	142.570.664	139.080.610,00	97,55
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	142.570.664	139.080.610,00	97,55
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	128.940.000	124.504.420,00	96,56
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	128.940.000	124.504.420,00	96,56
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	8.996.501.104	8.261.713.642,00	91,83
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.996.501.104	8.261.713.642,00	91,83
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	897.370.588	716.116.739,00	79,80
	Sekretariat Daerah	897.370.588	716.116.739,00	79,80
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	400.662.226	330.366.798,00	82,46
	Sekretariat daerah	400.662.226	330.366.798,00	82,46
C.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31.714.436.110	27.087.985.398,00	85,41
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	5.366.998.518	5.241.607.206,00	97,66
	Dinas Perhubungan dan Perikanan	5.366.998.518	5.241.607.206,00	97,66
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	2.067.053.338	2.060.954.500,00	99,70
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	2.067.053.338	2.060.954.500,00	99,70
28	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	18.590.354.318	14.342.537.774,00	77,15
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.590.354.318	14.342.537.774,00	77,15
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.733.199.420	1.731.320.747,00	99,89
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.733.199.420	1.731.320.747,00	99,89
30	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.803.830.516	3.558.576.083,0	93,55
	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.398.120.588	3.208.605.961,00	94,42
	UPT. Industri Rotan Hampangen	405.709.928	349.970.122,00	86,26
31	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	153.000.000	152.989.088,00	99,99
	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	153.000.000	152.989.088,00	99,99
D.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	120.073.783.185	105.141.546.494,00	87,56



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
32	Sekretariat Daerah	63.973.313.932	59.901.948.938,00	93,64
33	Sekretariat DPRD	56.100.469.253	45.239.597.556,00	80,64
E.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	325.923.825.987	173.422.123.290,83	53,21
34	PERENCANAAN	11.855.038.562	10.158.729.279,00	85,69
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	11.855.038.562	10.158.729.279,00	85,69
35	KEUANGAN	301.822.827.946	152.167.393.273,83	50,42
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	290.457.249.537	141.502.825.980,58	48,72
	Badan Pendapatan Daerah	11.365.578.409	10.664.567.293,25	93,83
36	KEPEGAWAIAN	10.416.267.079	9.589.172.034,00	92,06
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.416.267.079	9.589.172.034,00	92,06
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	628.316.000	328.047.860,00	52,21
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	628.316.000	328.047.860,00	52,21
38	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.201.376.400	1.178.780.844,00	98,12
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.201.376.400	1.178.780.844,00	98,12
39	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.939.895.457	12.373.797.618,00	88,77
	Inspektorat Daerah	13.939.895.457	12.373.797.618,00	88,77
40	UNSUR KEWILAYAHAN	52.667.030.923	49.359.799.929,50	93,72
	KECAMATAN	52.667.030.923	49.359.799.929,50	93,72
	Kecamatan Petak Malai	2.754.665.616	2.343.577.777,00	85,08
	Kecamatan Kamipang	3.829.449.331	3.802.580.656,00	99,30
	Kecamatan Tasik Payawan	3.290.941.019	3.121.165.327,00	94,84
	Kecamatan Katingan Hilir	5.793.115.124	5.516.989.137,00	95,23
	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	5.113.087.318	4.865.761.868,00	95,16
	Kecamatan Pulau Malan	3.775.506.047	3.553.729.345,00	94,13
	Kecamatan Sanaman Mantikei	3.618.048.323	3.503.444.121,00	96,83
	Kecamatan Marikit	2.839.558.215	2.660.424.321,00	93,69
	Kecamatan Katingan Hulu	3.912.551.323	3.782.915.282,00	96,69
	Kecamatan Mendawai	2.869.084.655	2.684.883.318,00	93,58
	Kecamatan Bukit Raya	2.882.070.627	2.511.190.273,00	87,13
	Kecamatan Katingan Kuala	4.126.615.443	3.765.217.469,00	91,24
	Kecamatan Katingan Tengah	5.185.908.662	4.678.706.181,00	90,22



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Kelurahan Kasongan Lama	421.302.370	387.251.176,00	91,92
	Kelurahan Kasongan Baru	648.615.000	599.765.247,00	92,47
	Kelurahan Pegatan Hilir	321.302.370	312.298.000,00	97,20
	Kelurahan Pegatan Hulu	321.302.370	312.290.000,00	97,20
	Kelurahan Pendahara	321.302.370	319.835.457,00	99,54
	Kelurahan Samba Kahayan	321.302.370	317.596.230,00	98,85
	Kelurahan Tumbang Sanamang	321.302.370	320.178.744,50	99,65
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	35.377.522.968	34.168.929.290,00	96,58
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.377.522.968	34.168.929.290,00	96,58
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.377.522.968	34.168.929.290,00	96,58

Sumber : BKAD Kab. Katingan Tahun 2024 (data sementara / unaudited)

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan, terdiri dari :

- Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).
- Pengeluaran Pembiayaan, mencakup Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Tabel 1.11
Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan TA. 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH	56,595,995,000.00	0.00	0.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	56,595,995,000.00	0.00	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	56,595,995,000.00	0.00	0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	100,00

Sumber : BKAD Kab. Katingan Tahun 2024 (data sementara / unaudited)



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan, adapun perubahan pendapatan daerah tahun 2024 sebagai berikut;

1. Pendapatan Asli Daerah, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah tidak ada Penyesuaian target;
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak tidak ada Penyesuaian target;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pendapatan Hibah tidak ada Penyesuaian target;

Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan meningkat sebesar Rp.164.743.001.000,00 atau 10,94% dari Rp.1.505.381.075.534,00 sebelum perubahan, menjadi Rp.1.670.124.076.534,00 setelah perubahan. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah tidak ada perubahan target, sedangkan dari sisi Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp.164.743.001.000,00 atau sebesar 11,87% dari Rp.1.387.371.580.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp.1.552.114.581.000,00 setelah perubahan, baik dari sisi pendapatan transfer pusat.

2.2 Perubahan Belanja Daerah

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:

1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;



- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Formulasi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD,

Penyesuaian alokasi belanja daerah Kabupaten Katingan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula dianggarkan sebesar Rp 1.592.124.885.638,00 bertambah Rp. 134.595.185.896,00 menjadi Rp.1.726.720.071.534,00 yang dirinci pada komponen belanja sebagai berikut:

- a. Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula dianggarkan sebesar Rp.993.847.922,00 bertambah Rp. 109.662.307.285,18 menjadi Rp. 1.103.509.571.207,18 atau 63,91 % dari total belanja daerah sebesar Rp. 1.726.720.071.534,00 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Penyediaan anggaran Belanja Modal semula dianggarkan sebesar Rp. 369.624.738.192,00 bertambah Rp. 18.156.992.298,82 menjadi Rp. 387.781.730.490,82 atau 22,46 % dari total belanja daerah sebesar Rp. 1.726.720.071.534,00 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



- c. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) semula dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 berkurang Rp. 1.767.772.750,00 menjadi Rp. 8.232.227.250,00, yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
- d. Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp. 218.652.883.524,00 Bertambah Rp. 8.543.659.062,00 menjadi Rp. 227.196.542.586,00 atau 13,16 % dari total belanja daerah sebesar Rp.1.726.720.071.534,00 dalam Peraturan Bupati Kabupaten Katingan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- e. Penyesuaian alokasi belanja daerah Kabupaten Katingan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 juga dipengaruhi oleh Kenaikan Pendapatan Daerah semula sebesar Rp. 1.505.381.075.534,00 bertambah Rp. 164.743.001.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.670.124.076.534,00 dan adanya Penyesuaian Penerimaan Pembiayaan Daerah semula sebesar Rp. 86.743.810.104,00 menjadi Rp. 56.595.995.000,00 atau turun sebesar Rp. 30.147.815.104,00.

2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dipengaruhi oleh Hasil Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Mempertimbangkan hal tersebut, maka pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 adalah :

a. Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun 2024 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 56.595.995.000,00 yang semula Rp. 86.743.810.104,00 atau 34,76%.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tidak ada (0,00)

Rincian Perubahan Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Katingan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 2.1
Rincian Perubahan Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Katingan Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.505.381.075.534,00	1.670.124.076.534,00	164.743.001.000,00	10,95
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.959.495.534,00	117.959.495.534,00	0,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	49.876.586.982,00	49.876.586.982,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.556.973.058,00	6.556.973.058,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.192.215.980,00	20.192.215.980,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	41.333.719.514,00	41.333.719.514,00	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.387.371.580.000,00	1.552.114.581.000,00	164.743.001.000,00	11,88
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.324.167.580.000,00	1.488.910.581.000,00	164.743.001.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.204.000.000,00	63.204.000.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA	1.592.124.885.638,00	1.726.720.071.534,00	134.595.185.896,00	8,46
5.1	BELANJA OPERASI	993.847.263.922,00	1.103.509.571.207,18	109.662.307.285,18	8,76
5.1.1	Belanja Pegawai	492.384.917.556,00	579.367.254.751,00	86.982.337.195,00	17,67
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	392.605.509.720,00	412.498.731.252,78	19.893.221.532,78	5,07
5.1.4	Belanja Subsidi	2.080.150.000,00	2.680.150.000,00	600.000.000,00	28,85
5.1.5	Belanja Hibah	102.780.826.310,00	105.685.085.505,40	2.904.259.195,00	2,83
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.995.860.336,00	3.278.349.698,00	- 717.510.638,00	-17,96
5.2	BELANJA MODAL	369.624.738.192,00	387.781.730.490,82	18.156.992.298,82	4,92
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.296.054.030,00	112.913.340.540,54	19.617.286.510,54	21,03



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.249.625.540,00	162.045.369.748,00	-1.204.255.792,00	-0,74
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	111.211.937.622,00	110.735.899.202,28	-476.038.419,72	-0,43
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.331.000,00	236.331.000,00	220.000.0000,00	1.347,14
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	8.232.227.250,00	-1.767.772.750,00	17,68
5.3.01	Belanja Tidak terduga	10.000.000.000,00	8.232.227.250,00	-1.767.772.750,00	17,68
5.4	BELANJA TRANSFER	218.652.883.524,00	227.196.542.586,00	8.543.659.062,00	3,91
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.230.692.724,00	6.481.006.786,00	4.250.314.062,00	190,54
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.422.190.800,00	220.715.535.800,00	4.293.345.000,00	1,99
	SURPLUS / (DEFISIT)	-86.743.810.104,00	-56.595.995.000,00	30.147.815.104,00	-34,76
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.743.810.104,00	56.595.995.000,00	-30.147.815.104,00	-34,76
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	86.743.810.104,00	56.595.995.000,00	-30.147.815.104,00	-34,76
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.743.810.104,00	56.595.995.000,00	-30.147.815.104,00	-34,7
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Katingan, Tahun 2024



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan 3 (tiga) tahun, mengingat Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018- 2023 yang telah berakhir di tahun 2023. Selanjutnya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan. Secara sistematis penyusunan mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024.



Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur .

Berikut perjanjian kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Katingan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran Daerah	Satuan	Target
1.	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,36
		Persentase Kecamatan Rawan Pangan	Persen	7,7
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	1,20
		LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	3,12
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	2,28
		Persentase pertumbuhan nilai investasi	Persen	0,6



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

2	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,86
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,99
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74
		Prevalensi Stunting	Persen	14
		Persentase penduduk miskin	Persen	4,95
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,90
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	86,20
3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	40,33
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Persen	75,33
		Persentase desa yang terlayani sektor transportasi	Persen	20
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Persen	62
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen	75
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	Persen	43,17
		Persentase permukiman kumuh yang ditangani	Persen	70
4	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal	Persentase penurunan kasus kriminal	Persen	50
		Persentase penanganan kasus K3	Persen	100
		Persentase konflik sosial yang ditangani	Persen	100
		Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	60
5	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	52.50
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	89.00
		Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	86.00
6	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	144,40
7	Meningkatnya kualitas	Nilai SAKIP	Predikat	B



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

	penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai LPPD	Kriteria	Tinggi
		Opini BPK	Predikat	WTP
		Nilai MCP	Poin	84
8	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	85,00
		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,01
		Indeks SPBE	Predikat huruf	B
		Persentase desa berkembang	Persen	63

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Katingan, Tahun 2024

Dalam RPD tahun 2024-2026 terdapat Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Katingan kedepannya. Dalam hal melakukan analisis capaian kinerja pemerintah maka yang harus dilihat adalah indikator tujuan yang akan diukur setiap akhir tahun pelaksanaan RPD dan indikator sasaran yang diukur setiap akhir tahun anggaran. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian target dan realisasi serta capaian kinerja pada masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :





Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RPD	Target Perkin	Realisasi	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,84	-	4,67		Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		PDRB per Kapita	Juta Rp.	57.2	-	67,9		Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
	1.1 Meningkatkan daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2.36	2,36	3.32	140,68	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		Persentase Kecamatan Rawan Pangan	Persen	7,7	7,7	23,08	33,37	Hasil Perhitungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	1,20	1,20	5,86	488	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

			LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	3,12	3,12	0,78	25	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	
			Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	2,28	2,28	5,83	261,16	Laporan buku tamu objek wisata	
			Persentase pertumbuhan nilai investasi	Pesen	0,6	0,6	0,46	76,6	LKPM	
2	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,09	-	74,37		Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	85,80	-	89,31		Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	
		2.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.80	8,86	8,95	101	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,99	12,99	12,99	100	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	
			Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,16	74	74,14	100	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

			Prevalensi Stunting	Persen	14	14	10,5	133	Dinas Kesehatan (Bidang Kesehatan Masyarakat)	
			Persentase penduduk miskin	Persen	4,95	4,95	5,26	94	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4.90	4,90	4,88	100,40	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	86,20	86,20	89.31	103,608	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	
3	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata		Indeks Infrastruktur	Persen	29,54	-	72,02		Hasil Perhitungan Mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan	
			Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten	Persen	81,00	-	76,07		Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan	
		3.1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	40,33	40,33	37,88	87,42	Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

				Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Persen	75,31	75,33	61,75	81,97	Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan
				Persentase desa yang terlayani sektor transportasi	Persen	20	20	16,24	81	Hasil perhitungan mandiri Dinas Perhubungan dan Perikanan
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Persen	34,57	62	61,62	99,38	Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen	34,78	75	76,66	102	Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	Persen	43,17	43,17	43,17	100	Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase permukiman kumuh yang ditangani	Persen	70	70	78,98	112,82	SK Kawasan Kumuh (SK belum selesai dan belum terbit)



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

4	Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan).		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	77,07	-	76,47		Hasil penilaian Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas
			Persentase penyelesaian kasus SARA	Persen	100	-	100		Hasil penilaian Bidang Kewaspadaan Nasional
	4.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal	Persentase penurunan kasus kriminal	Persen	50	50	73	68,49	Polres Katingan
			Persentase penanganan kasus K3	Persen	100	100	100	100	Hasil perhitungan mandiri Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Persentase konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	Hasil perhitungan Bidang Kewaspadaan Nasional
			Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	60	60	46,67	77,78	Keputusan Bupati tentang penetapan Cagar Budaya Kabupaten



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74.62	-	76,81		Hasil perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup
		5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	52.50	52.50	50,74	96,65	Hasil perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	89.00	89.00	95,20	106,97	Hasil perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup
				Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	86.00	86.00	87,54	101,79	Hasil perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup
		5.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	144,40	144,40	140,74	102,60	Laporan Hasil Evaluasi Bada Nasional Penanggulanga Bencana
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel			Indeks RB	Predikat	CC		BB		Laporan Hasil Evaluasi Kemen PANRB



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

		6.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB
				Nilai LPPD	Kriteria	Tinggi	Tinggi	Masih Prose penilaian	-	Peringkat dalam Laporan EKPPD dari Kemendagri
				Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	Masih Prose penilaian	-	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
				Nilai MCP	Poin	84	84	87	103,57	Website : jaga.id
		6.2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	85,00	85,00	84,77	99,72	Laporan Hasil SKM
				Indeks Pelayanan Publik	Nilai	-	3,01	3,60	119	Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB
				Indeks SPBE	Predikat huruf	B	B	B	100	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
				Persentase desa berkembang	Persen	63	63	60,39	95,85	Hasil Penghitungan Tingkat Perkembangan Desa
Jumlah capaian kinerja									111,58	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Katingan, Tahun 2024



Dalam rangka menerapkan manajemen kinerja dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan yang menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Dalam RPD Tahun 2024-2026 terdapat Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Katingan kedepannya. Sebagai bahan pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 serta memudahkan dalam pelaksanaan analisis capaian kinerja maka kemudian ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Dalam hal melakukan analisis capaian kinerja pemerintah maka yang harus dilihat adalah indikator tujuan yang akan diukur setiap akhir tahun pelaksanaan RPD dan indikator sasaran yang diukur setiap akhir tahun anggaran.

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing – masing Kegiatan pada Setiap Urusan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 terkait urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Kabupaten Katingan melaksanakan urusan tersebut meliputi :

1. Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
2. Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Mas Amsyar Kasongan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
6. Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

1. Tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;



2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
4. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Perikanan;
8. Komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
9. Koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
10. Penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
11. Kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
12. Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
13. Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;

Untuk urusan pemerintahan pilihan, Kabupaten Katingan melaksanakan urusan tersebut meliputi :

1. Kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Perikanan;



2. Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
3. Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
4. Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
5. Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang, Kabupaten Katingan melaksanakan urusan tersebut meliputi :

1. Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah yang terdiri atas 10 Bagian, Sekretariat DPRD, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 13 Kecamatan.
2. Pengawasan dilaksanakan Oleh Inspektorat Kabupaten Katingan
3. Perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.
4. Keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kepegawaian dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan.

Capaian kinerja keluaran masing – masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan / urusan penunjang / urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



A. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.3
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2024

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan	325.782.422.811	268.881.666.931	1. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2023 untuk Jenjang Pendidikan Dasar mengalami kenaikan menjadi 2,78 % dari 89,95 % tahun 2023 dan pada tahun 2024 menjadi 92,73 % penyebabnya adalah karena ada usia dibawah 7 tahun dan diatas 16 tahun yang masih terdata di jenjang TK/RA dan di Jenjang Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA, dan sebagian Siswa yang	1. Adapun upaya yang dilakukan yaitu : a. Akan dilakukan koordinasi kepada sekolah SD dan SMP serta setingkatnya, untuk selalu aktif dalam hal sinkronisasi data setiap 2 minggu sekali sesuai dengan edaran dari Kemendikbud maupun Kemenag, serta menjangir anak usia sekolah untuk bersekolah dan membuat rekapitulasi bagi siswa yang tidak
			Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja	91.077.688	59.114.500		
			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	318.198.811.440	263.412.587.972		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.800.000	266.015.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.174.281.665	2.272.047.058		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	706.000.000	686.379.494		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.425.224.731	1.811.717.811	<p>belajar keluar daerah;</p> <p>2. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 7,17 % untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yaitu 77,75 % tahun 2023 dan 84,92 % untuk tahun 2024, karena satuan pendidikan telah mulai aktif mensinkronisasikan Dapodik, tetapi masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu masih ada Desa yang satuan PAUD belum memiliki NPSN;;</p> <p>3. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2024 mengalami kenaikan</p>	<p>sekolah dengan keterangan yang disesuaikan untuk di teruskan ke masing-masing Bidang Pembinaan PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan PNF/PPs untuk ditindaklanjuti oleh SKB, PKBM dan PPs setempat;</p> <p>b. Untuk meningkatkan SPM Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan masyarakat setempat dengan sekolah daerah khusus atau terencil membuka sekolah terintegrasi SD Negeri Tumbang</p>
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.227.287	373.805.096		
			Program Pengelolaan Pendidikan	116.384.526.321	113.273.929.835		
			Program Pendidikan Sekolah Dasar	53.936.797.323	52.845.587.871		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.079.926.242	44.264.828.887		
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14.869.203.080	13.357.094.306		
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.498.599.676	2.184.285.250		
			Program Pengembangan Kurikulum	462.365.000	195.671.771		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penetapan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Dasar	402.365.000	46.863.536	menjadi 0,75 % untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan dari tahun 2023 yaitu 72,25 % dan pada tahun 2024 menjadi 72,79 % Karena adanya penambahan satuan Pendidikan Kesetaraan sehingga data anak Putus Sekolah (Drof Out) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dapat terakomodir, dan untuk meningkatkan capaian SPM kami tetap dengan fokus ke PKBM dengan <i>Satu Kecamatan Satu PKBM</i> ;	Tangoi di Dusun Jamparan Kecamatan Petak Malai. Anak – anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar bisa mengenyam pendidikan yang layak dengan ditugaskan 1 (satu) orang guru PNS bersama dengan Tenaga Pengajar yang secara sukarela mengabdikan sebagai guru tambahan dan bantuan buku-buku pelajaran atau buku pegangan guru yang dikirim oleh kemendikbutristek. c. Untuk pendataan siswa disekolah dan
			Penetapan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini	60.000.000	46.797.800		
			Program Pendidikan dan tenaga Kependidikan	121.500.000	96.030.000		
			Pemerataan Kuantitas an Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	121.500.000	96.030.000		
			Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	377.215.000	283.633.950		
			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang	377.215.000	283.633.950		

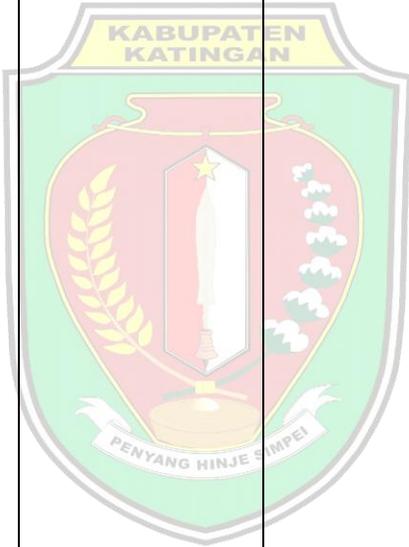


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penuturannyadalam Daerah Kabupaten/Kota				dimasukkan di Dapodik harus menggunakan NIK perekaman, supaya bagi siswa yang tidak mampu layak mendapatkan PIP (Program Indonesia Pintar) untuk mendorong peningkatan SPM tahun berikutnya. 2. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF akan bekerja keras untuk bekerjasama dengan salah satu Lembaga Yayasan Pendidikan agar bisa membrikan pembinaan dan pendampingan bagi desa yang belum memiliki NPSN untuk



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>tercapainya <i>Satu Desa Satu PAUD</i>, dengan cara mempermudah pengurusan dan penerbitan NPSN, untuk selanjutnya ditinjau lanjuti ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu agar mempunyai NPSN dan terdata di Dapodikdasmen;</p> <p>3. Akan dilakukan pembinaan bagi satuan pendidikan yang memiliki Akte Notaris PKBM untuk mengembangkan atau membuka layanan seperti Pendidikan Kesetaraan, dan akan selalu dibimbing baik dari pencarian siswa maupun</p>



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>mensingkronisasi di Dapodikdasmen serta membuka PKBM untuk Kecamatan yang belum memiliki Pendidikan Kesetaraan, sesuai data masih ada 7 (tujuh) Kecamatan yang belum memiliki PKBM;</p> <p>4. Melakukan optimalisasi seluruh kegiatan baik itu Fisik maupun Nonfisik, serta aktif melakukan monitoring kegiatan di tiap tahap pencairan anggaran, dan menginventarisir kegiatan pada tahun 2023 dan akan diakomodir di tahun 2024.</p>



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	145.097.587.003,66	143.062.810.944	<ul style="list-style-type: none"> • Stunting Kabupaten Katingan tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 namun dinilai masih tinggi. • Masih Tingginya Angka Kematian Bayi Tahun 2024 • Keterbatasan Jumlah, Kompetensi Tenaga Kesehatan Serta Sebaran Distribusi Yang Tidak Merata. • Keterbatasan Anggaran Dan Belum Optimalnya Penyusunan Anggaran Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen, Kerjasama Dan Dukungan Pemerintah Daerah Dan Lintas Sektor Untuk Pelaksanaan Penurunan Angka Stunting Dan Masalah Kesehatan Lainnya Di Kabupaten Katingan. • Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sudah mengupayakan pemenuhan tenaga melalui Pengusulan dan pemenuhan Tenaga Kesehatan dari Tenaga Penugasan Khusus (Nusantara Sehat) yang pemenuhan tenaganya difasilitasi langsung melalui Kementerian Kesehatan. Dinas
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	101.729.463.797,01	99.084.020.287		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.520.542.178	7.965.489.027		
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	1.052.601.000	1.033.123.972		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	1.923.873.139,00	1.880.503.293,00			



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						<ul style="list-style-type: none">• Kondisi Geografis Dan Transportasi Serta Keberadaan Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Terbatas Dan Belum Merata.• Rangkap Kegiatan (Multiple Job) Dan Pembagian Beban Kerja Yang Tidak Merata Di Kalangan Pekerja Kesehatan.	<p>Kesehatan Kabupaten Katingan dan BKPSDM sudah berkolaborasi dalam hal pengusulan pengisian tenaga kesehatan sesuai standar melalui penerimaan CPNS dan PPPK dibantu dengan Sistem Perhitungan Renbut (Rencana Kebutuhan) milik Kementerian Kesehatan yang pengusulan dan perencanaan kebutuhannya sudah dibantu sistem aplikasi dan disesuaikan dengan standar serta kebutuhan Puskesmas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan Anggaran Baik Anggaran



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Dan Apbn. Dukungan Beberapa Sumber Pendanaan Lainnya Non Pemerintah, Diantaranya Pendanaan Dari Corporate Social Rensposibility (CSR) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).</p> <ul style="list-style-type: none">• Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan, Khususnya Dalam Pengembangan UKBM Dan PHBS.• Melakukan Optimalisasi Seluruh Kegiatan Baik Itu DAK Fisik Maupun Dak Nonfisik Dengan Aktif Melakukan Monitoring Kegiatan Ditiap Tahap



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pencairan Anggaran
		BLUD Mas Amsyar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94.458.997.435	28.170.464.033	Kegiatan direncanakan untuk renovasi lantai 2 bangunan poliklinik dijadikan Aula, sampai dengan akhir tahun anggaran kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena belum ada tempat merelokasi ruang tunggu poliklinik selama masa pekerjaan konstruksi dilaksanakan. Selain itu, setelah diumumkan, belum ada penyedia yang melakukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perencanaan dengan baik pada awal penganggaran. • Merencanakan persiapan lahan, Ruang pengganti sebagai pengganti sebelum membuat perencanaan anggaran fisik.
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	45.751.514.421	44.974.465.512			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	217.992.000	0			
4	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10,155,930,116.00	9,275,712,854.80	Terjadi Perpanjangan Kontrak Melampaui Tahun Anggaran 2024 Atas Satu Paket Pekerjaan	Upaya yang telah dilakukan yaitu memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa sampai
			Program Pengelolaan	16,160,000,000.00	16,030,620,615.00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sumber Daya Air (Sda)			bersumber dari Dana DAK ('Penanganan Long Segmen Jalan Katingan II DAK Tematik dengan Pagu Rp. 15.036.047.100) yang terealisasi di T.A 2024 sebesar 73,91% sehingga berpengaruh besar pada realisasi keseluruhan karena nilai paket tersebut cukup besar.	dengan 50 (lima puluh) hari kalender sesuai pasal 32 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dengan pengenaan sanksi/denda keterlambatan pekerjaan kepada Penyedia Jasa dan Perpanjangan Masa Berlaku Jaminana Pelaksanaan. (Masa Perpanjangan 23 Desember 2024 s/d 10 Februari 2025)
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2,820,000,000.00	2,351,853,099.00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	15,000,000.00	14,560,460.00		
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	800,000,000.00	771,312,488.00		
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,446,000,000.00	1,258,938,770.98		
			Program Pengembangan Permukiman	1,541,000,000.00	1,539,600,000.00		
			Program Pentaaan Bangunan Gedung	8,149,000,000.00	8,127,180,242.00		
			Program Pentaaan	10,865,000,000.00	10,825,951,869.00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bangunan Dan Lingkungannya				
			Program Penyelenggaraan Jalan	81,090,352,330.00	75,992,463,234.13		
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	335,630,000.00	334,266,050.00		
			Program Penyelenggaraan Tata Ruang	1,187,440,000.00	1,168,937,616.00		
5	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Program Kawasan Permukiman Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rtlh Beserta Psu	200.000.000	146.400.199	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan anggaran pendamping untuk menunjang kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) yang berasal dari dana APBN. Terlambatnya pelaksanaan Fisik BSPS yang idealnya dilaksanakan selama 8 bulan (maret – 	Melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak SATKER Penyedia Perumahan, sehingga untuk mengetahui desa/Lokasi yang akan mendapatkan BSPS, sehingga pelaksanaan fisik BSPS lebih cepat dilaksanakan sehingga penyerapan dana pendamping ini dapat terserap secara beriringan dengan pelaksanaan BSPS.
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kegiatan : Pencegahan	531.346.243	462.652.124		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha Pekerjaan Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat.			oktober) tetapi kegiatan ini dilaksanakan hanya kurang lebih 2 bulan (November – desember) sehingga tidak cukup waktu untuk menyerap secara maksimal anggaran pendamping yang berupa biaya operasional. • Terdapat sisa anggaran BOP yang tidak terserap karena jumlah unit yang ditargetkan dalam rencana pemenuhan BOP penunjang kegiatan tersebut tidak sesuai dengan jumlah unit	



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						rumah yang diperbaiki menggunakan dana APBD akibat terjadinya pergeseran arah penangan dana Aspirasi yang semula senilai 1M (50 unit) hanya menjadi 9 unit.	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu).	23.697.250.000	23.094.989.419	<ul style="list-style-type: none">• Dominasi pekerjaan yang melalui proses pengadaan barang jasa terdapat sisa tender pada setiap item rincian pekerjaan• Terdapat paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan (Kontraktor tidak tanda tangan kontrak)• Terdapat sisa anggaran BOP yang	



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						tidak terserap karena digunakan sesuai kebutuhan	
6	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.404.176.155	1.248.607.336	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terlaksana secara maksimal untuk sosialisasi pembentuk Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kecamatan dengan target 13 Kecamatan yang terealisasi hanya 1 kecamatan dikarenakan keterbatasan anggaran tahun 2024. • Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan belum maksimal hanya masih diwilayah kecamatan Katingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menganggarkan kembali anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di tingkat kecamatan dengan menargetkan sebanyak minimal 6 kecamatan berdasarkan jumlah penduduk yang berbeda suku. • Menganggarkan kembali ditahun berikutnya untuk pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dengan menargetkan minimal 3 kecamatan wilayah hulu.
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	28.049.325.009	27.989.175.814		
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	1.013.175.560	1.007.833.992		
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, Dan Budaya.	450.000.000	432.113.398		
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	289.644.770	224.862.580		

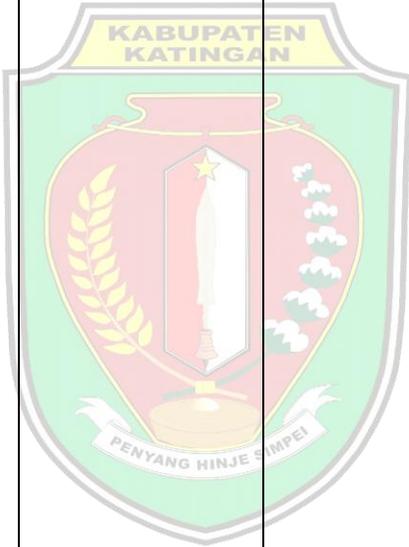


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			Hilir dengan menargetkan tenaga pendidik (Guru Penggerak)	<ul style="list-style-type: none"> • Menganggarkan kembali ditahun berikutnya dengan menargetkan 16 hari untuk kegiatan PUSDIKLAT Paskibraka sesuai degan SOP BPIP Pusat • Perlu Dilakakuan Sosialisasi Dini Dengan Melaksanakan Per Kecamatan Agar Tiap Desa Dapat Menghadiri Dalam Sosialisasi Pendidikan Politik • Perlu Dilaksanakan Sosialisasi Terkait Pemberdayaan Ormas Yang Ada Di Kabupaten Katingan • Perlu dianggarkan kembali untuk Kegiatan P4GN dengan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.171.201.474	3.250.486.170	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Paskibraka Tahun 2024 belum sesuai SOP dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT), anggaran hanya mampu selama 12 hari sedangkan dalam SOP BPIP Pusat minimalm 16 Hari. • Masih Kurangnya Sosialisasi Terkait Pemilih Pemula Dan Pemilih Perempuan Dalam Pendidikan 	

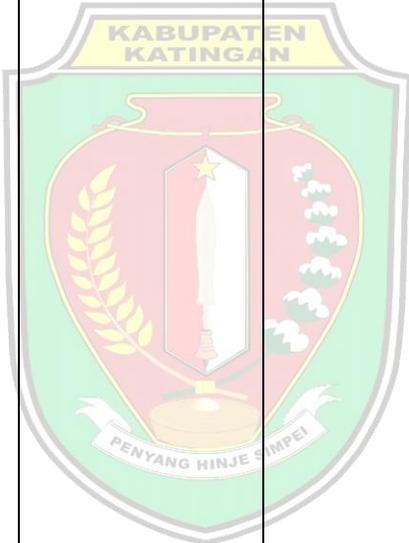


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>Politik Ditingkat Masyarakat Kabupaten Katingan karena anggaran hanya tersedia untuk Hibah Dukungan PILKADA Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Masih Kurangnya Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, untuk Tahun 2024 hanya terlaksana sosialisasi terkait Keberadaan Ormas• Masih Belum Maksimalnya Penyelenggaraan Kegiatan P4gn (Pencegahan,	<p>menargetkan kembali minimal 4 Kecamatan berdasarkan hasil analisa dan laporan yang diterima oleh TIMDU P4GN</p> <ul style="list-style-type: none">• Menganggarkan kembali ditahun berikutnya untuk pelaksanaan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ditingkat kecamatan dengan target minimal 4 kecamatan• Perlu Dilaksanakan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Dalm Penyusunan Evaluasi Dan Pelaporan Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dan Laporan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>Pemberantasan, Dan Peredaran Gelap Narkotika) karena hanya terlaksana di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Katingan Tengah dan Sanaman Mantikei berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none">• Masih belum terbentuknya forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) karena belum terlaksananya sosialisasi ditingkat kecamatan• Masih belum maksimalnya	Keuangan Opd

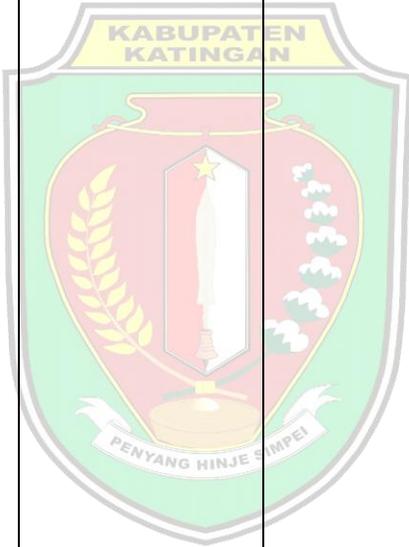


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis untuk pegawai ASN	
7	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.781.850.019	28.096.636.541	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan baik secara kualitas dan kuantitas, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan Perda/Perkada dan minimnya anggaran yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dengan luas Kabupaten Katingan adalah 20.382,26 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan anggaran untuk memenuhi ketentuan mengikuti diklat dasar Pol PP yang sesuai Permendagri Nomor 38/2010 tentang Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP dan Pemenuhan Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.029.985.184	3.014.118.149			
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			2.006.868.605	1.999.140.633			

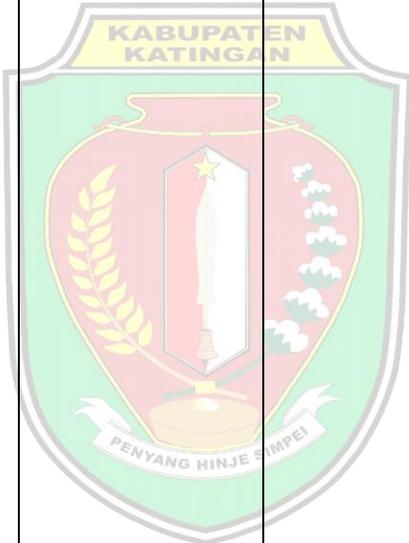


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>kilometer persegi, terdiri dari 13 kecamatan 154 Desa dan 7 Kelurahan dalam mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu diperlukan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan sangat diperlukan melalui kegiatan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di 154 Desa</p>	<p>tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran serta peningkatan kapasitas Satlinmas Desa/Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam memenuhi target Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban

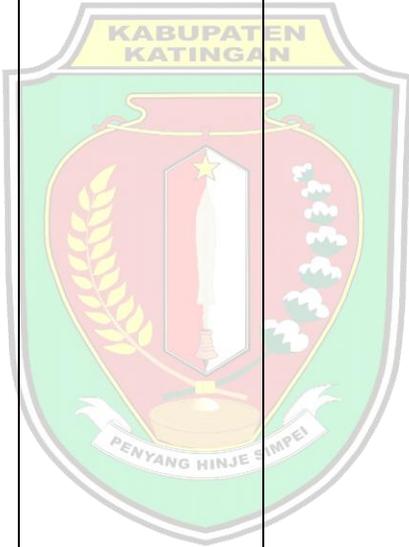


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						dan 7 Kelurahan di Kabupaten Katingan. • Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat sasaran dari indikator ini cakupannya sangat luas, mengingat luas wilayah Kabupaten Katingan yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan hanya 6 Kecamatan yang ada Pos dan Personil Pemadam Kebakarannya yaitu Pos Pemadam Kecamatan Katingan Hilir yaitu Pos	Kebakaran mengingat luas Kabupaten Katingan adalah 20.382,26 kilometer persegi yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 154 Desa da 7 Kelurahan sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam membantu anggota pemadam kebakaran melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi

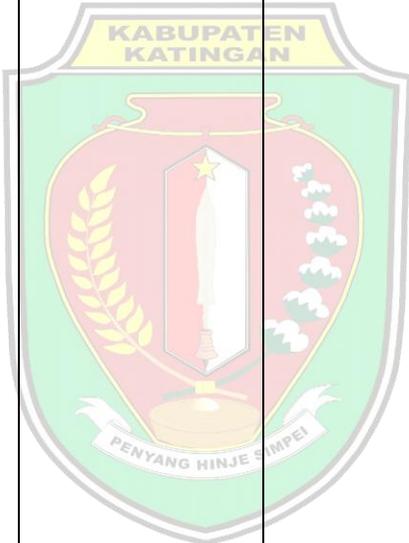


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemadam Kebakaran Katunen, Pos Pemadam Kebakaran Kereng Humbang, dan Pos Pemadam Kebakaran Kereng Pangi, Pos Pemadam Kebakaran Pendahara di Tewang Sanggalang Garing, Pos Pemadam Kebakaran Samba Danum dan Pos Pemadam Kebakaran Samba Bakumpai di Kecamatan Katingan Tengah, Pos Pemadam Kebakaran Tumbang Sanamang di Kecamatan Katingan Hulu, Pos Pemadam Kebakaran Baun Bango di Kecamatan Kamipang dan Pos	dalam memberdayakan masyarakat oleh Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan yang bekerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait, meningkatkan kualitas aparatur pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai di Pos Pemadam Kebakaran, penambahan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan yang belum ada Pos Pemadam



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemadam Kebakaran Pegatan di Kecamatan Katingan Kuala. Kendala yang dihadapi terkait indikator ini yaitu kurangnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran baik permukiman maupun lahan, kualitas aparatur pemadam kebakaran belum memadai baik secara kualitas dan kuantitas, terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta minimnya anggaran sehingga kurang efektif dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.	Kebakaran serta membentuk dan membina Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di 154 Desa dan 7 Kelurahan.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.904.750,00	<ul style="list-style-type: none"> Belum Memadainya Prosedur Dan Regulasi Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Bencana Di Indonesia Termasuk Belum Terpenuhinya Seluruh Amanah Aturan Dan Regulasi Yang Di Kehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Masih Tersebar Dan Belum Terbangun Sistem Informasi Dan Komunikasi Secara Kebencanaan Secara Terpadu Dan Terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan Media Komunikasi Sosial Yang Ada Secara Efektif Sebagai Sarana Informasi Dan Komunikasi Yang Terpadu Dan Terintegrasi. Mengajukan Proposal Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Bekerja Sama Dengan Bpbpk Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Penyediaan Peralatan Dan Logistik Bantuan Untuk Korban Bencana. Berkoordinasi Secara Intensif Dengan Stakeholder Yang Ada (Instansi Vertikal, S opd
			Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	6.000.000,00	5.966.250,00		
			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	6.000.000,00	5.938.500,00		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.298.907.424,00	2.604.071.870,00		
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	3.298.907.424,00	2.604.071.870,00		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.000.000,00	85.800.000,00		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	96.000.000,00	85.800.000,00		
			Administrasi Umum	895.681.201,00	875.497.700,00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Perangkat Daerah			<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. • Adanya Perubahan Iklim Yang Mengakibatkan Intensitas Terjadinya Bencana Didaerah Semakin Tinggi. • Meningkatnya Eksploitasi Sumber Daya Alam Yang Berpotensi Menimbulkan Bencana. 	Terkait, Pihak Swasta Dan Masyarakat). <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan Posko Siaga Dan Rutin Melaksanakan Patroli Dengan Instansi Terkait Untuk Mengantisipasi Terjadinya Bencana Yang Lebih Besar Lagi.
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.801.800,00	12.594.000,00		
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	106.892.315,00	97.732.500,00		
			Penyedia Peralatan Rumah Tangga	8.199.125,00	5.682.000,00		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.249.800,00	163.510.300,00		
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	72.359.406,00	70.751.300,00		
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	19.576.000,00	15.782.000,00		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	510.602.755,00	509.445.600,00		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	400.000.000,00	395.695.550,00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemerintahan Daerah				
			Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	400.000.000,00	395.695.550,00		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.180.000,00	315.568.014,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	66.100.000,00	61.755.014,00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.080.000,00	253.813.000,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	762.983.335,00	692.356.950,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau	700.183.335,00	634.881.950,00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lapangan				
			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	12.800.000,00	7.620.000,00		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.855.000,00		
			Program Penanggulangan Bencana				
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	666.247.265,00	310.856.587,00		
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	666.247.265,00	310.856.587,00		
			Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.988.027.900,00	1.732.441.493,00		
			Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	300.000.000,00	177.548.635,00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terhadap Bencana Kab/Kota				
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (Trc) Bencana Kabupaten/Kota	984.176.000,00	878.277.400,00		
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70.773.500,00	54.705.458,00		
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kota	633.078.400,00	621.910.000,00		
			Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	1.023.440.144,00	949.570.660,00		
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	127.940.144,00	124.038.160,00		
			Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30.550.000,00	24.258.100,00		
			Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	164.950.000,00	109.783.300,00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kabupaten/Kota				
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	700.000.000,00	691.491.100,00		
			Penataan system dasar penanggulangan Bencana	260.100.138,00	227.089.138,00		
			Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	260.100.138,00	227.089.138,00		
		Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.258.434.606	4.907.357.007	<ul style="list-style-type: none">• Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan angka kemiskinan dari Tahun 2023 = 4,99% menjadi tahun 2024 = 5,26%• Dalam Layanan Kedaruratan, Sarana Angkutan Dan Mobilitas Yang Dimiliki Terbatas.• Dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Maksimal (SPM) Masih Terkendala Dengan	<ul style="list-style-type: none">• Solusi Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Adalah memfungsikan Rumah Singgah/Shelter• Terdapat Anggaran Operasional Rumah Singgah Dan Shelter Dari Pemerintah Daerah.• Terdapat Anggaran Rehabilitasi Perawatan Dan Pengobatan Orang Terlantar.• Solusi Yang Dilakukan Selama Tahun 2024



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>Ketersediaan Data Yang Valid Serta Masih Rendahnya pemahaman Stakeholder Terkait Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Spm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Tahun 2024 Terjadi Kenaikan beberapa harga barang Yang menyebabkan Kenaikan Inflasi Yang Berdampak Luas Terhadap Masyarakat. • Dalam Pemenuhan Layanan SPM, Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Masih Terbatas. • Shelter/Rumah Singgah 	<p>Adalah Dengan Melakukan Carter Kendaraan Sesuai Kebutuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu Dilakukan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi SDM Pekerja Sosial Yang Ada Di Dinas Sosial Terkait Kualitas Dan Kuantitas Layanan SPM. • Melakukan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Kpm Untuk Mengurangi Dampak Inflasi Bagi Masyarakat. • Melakukan Optimalisasi, Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sarana Dan Prasarana Yang Ada. • Secara Intensif Melakukan Verifikasi



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						sudah tersedia namun masih belum berfungsi. • Ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Valid Masih Belum Memadai.	Dan Validasi DTKS Dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Data Baik Tingkat Kabupaten Maupun Tingkat Kecamatan Dan Desa.

Sumber: Masing-masing Perangkat Daerah Terkait (data diolah)



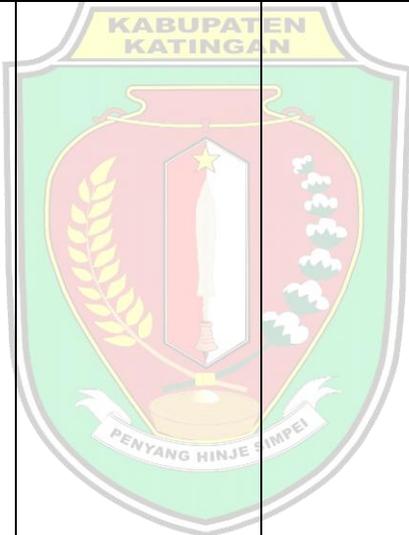
B. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.4
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.106.885.853	4.273.674.600	<ul style="list-style-type: none">Masih banyak urusan penunjang yang belum diakomodir untuk menunjang urusan tenaga kerja dan transmigrasiKebijakan-kebijakan sektoral yang belum dilaksanakan sesuai perencanaan tenaga kerjaTidak adanya instruktur pada Balai Latihan Kerja	<ul style="list-style-type: none">Mengusulkan penambahan pagu sebagai upaya meningkatkan pemerintahan yang akuntabilas.Konsistensi pelaksana kebijakan program kegiatan pada rencana tenaga kerja daerah.Mengusulkan tenaga instruktur baru melalui penerimaan PNS dan P3K ataupun melalui jalur penyetaraan jabatan yang berkompeten dan
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	20.000.000	19.983.100		
			Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	850.000.000	679.899.398		
			Program Penempatan Tenaga Kerja	248.114.667	235.189.990		
			Program Hubungan Industrial	2.550.486.136	2.428.154.766		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Katingan <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya rangka pencetakan AK I bagi pencari kerja dan pemberian informasi bagi pencari kerja. • Belum adanya pengantar kerja • Dalam penyelesaian kasus di perusahaan sering dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi di Provinsi karena tidak ada tenaga mediator di Kabupaten. 	bersertifikasi kepada pemerintah daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan pendaftaran AK baik secara online dan offline untuk mencapai target yang ditentukan dan meningkatkan anggaran pada program penempatan tenaga kerja. • Melakukan pengusulan dan pelatihan bagi pengantar kerja. • Pengusulan tenaga mediator hubungan industrial.
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.498.500	62.765.900	<ul style="list-style-type: none"> • karena adanya perubahan kebijakan/regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung kembali anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan yang



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Anak	dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.161.018	539.132.909	<p>ditengah proses perencanaan dan realisasi sesuai dengan kebutuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena Tidak ada APBD Perubahan • Pagu Anggaran terlalu besar karena SPJ disesuaikan dengan tagihan PLN dan pembayaran pajak kendaraan Adanya efisiensi anggaran • Karena adanya efisiensi anggaran • Karena adanya efisiensi anggaran 	<p>diperlukan untuk tahun berikutnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efesiensi penyerapan dan ketepatan waktu dalam penggunaan atau memproses kebutuhan rumah tangga kantor • Menghitung kembali penggunaan dan kebutuhan agar dapat disesuaikan • Melakukan koordinasi dengan pihak anggaran terkait kegiatan dimaksud
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	886.000.568	798.171.886		
			Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kab/Kota	200.000.000	179.322.000		
			Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia Layanan	300.000.000	280.278.250		
						•	•
3	Pangan	Dinas Ketahanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan	580.476.826	481.890.589	<ul style="list-style-type: none"> • Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya strategis untuk meningkatkan skor PPH



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan Masyarakat	66.011.448	43.713.900	tahun 2024 Kabupaten Katingan mencapai 86 mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 87,1. penurunan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbanyak konsumsi umbi-umbian, buah dan sayuran meskipun konsumsi minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula masih tinggi dan masih sama seperti	dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah melalui Edukasi tentang konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) yang perlu digencarkan <ul style="list-style-type: none">Dalam rangka menurunkan persentase kecamatan rawan pangan di kabupaten Katingan diperlukan Integrasi lintas sektor untuk memperbaiki akses fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	48.304.200	35.388.650		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						tahun 2023. • Selain itu persentase kecamatan rawan pangan dikabupaten katingan juga masih tinggi yaitu sebesar 23,08 %	
4	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN	150.000.000	137.513.300	a. Pengadaan tanah skala kecil 1. Pelaksanaan pengadaan tanah wajib dalam kawasan APL. 2. Penganggaran pengadaan tanah masih banyak fluktuatif tidak tepat sasaran penilaian Dasar KJPP penilai tanah publik.	a. Pengadaan tanah skala kecil 1. Berdasarkan edaran Sekretaris Daerah No 590 /231 Tahun 2021 tentang untuk Belanja Modal pengadaan tanah pada Instansi yang memerlukan. 2. Istansi yang memerlukan wajib membuat Dokumen Perencanaan. 3. Penilaian harga tanah dilaksanakan oleh KJPP penilai harga tanah.
				135.000.000	124.652.000		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Kegiatan : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM REDISTRIBUSI	 400.000.000	384.699.769	b. Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah 1. Sengketa pemilikan tanah sering terjadi dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Ketidakjelasan kepemilikan dan batas-batas lahan/tanah sering menjadi sumber konflik antara individu, kelompok, atau	b. Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah 1. Berdasarkan Surat Bupati Katingan Nomor 610/94/DISPERKIMTAN-4/V/2021 agar masing-masing Dinas membuat Plang dan Patok batas dilapangan. 2. Berdasarkan Surat Bupati Nomor 590/84 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Pensertifikatan Aset Tanah Milik Daerah dan Pengintegrasian Data Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</p> <p>Kegiatan : Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah</p>			<p>lembaga.</p> <p>c. Penyelesaian Sengketa tanah garapan</p> <p>1. Surat-surat Kepemilikan Lokasi Sengketa masih tidak teradminitrasi Baik (tidak tersistem koordinat).</p>	<p>Tahun Anggaran 2023.</p> <p>3. Sistem Pendaftaran Tanah yang Efisien</p> <p>c. Penyelesaian Sengketa tanah garapan</p> <p>1. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 610/17/DISPERKIMTAN-4/1/2022 tentang Himbauan Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Tingkat Kecamatan /Desa/Kelurahan.</p> <p>2. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 590/87 Tahun 2023 tentang Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.</p> <p>3. Penerapan mekanisme</p>



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							mediasi dan arbitrase dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa pemilikan tanah.
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	450.000.000	409.874.590		
5	Lingkungan	Dinas	Program Penunjang	6.001.297.660,00	5.701.133.095,00	• Tingginya pencemaran	• Melaksanakan sosialisasi



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hidup	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			air. • Tingginya kerusakan lingkungan. • Tata kelola persampahan masih dengan cara pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan di TPA. • Terbatasnya armada angkutan sampah. • Masih minimnya fasilitas pengolahan sampah. • Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan kelestarian air sungai. • Belum optimalnya pengelolaan Limbah	kepada pelaku usaha untuk melakukan pengolahan limbah dengan benar. • Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. • Melaksanakan reboisasi dan rehabilitasi lahan. • Membuat bank sampah. • Membuat TPST3R dan melakukan olah pilah sampah. • Mengusulkan tambahan unit pengangkut sampah. • Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). • Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	183.720.000,00	180.436.773,00		
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	3.233.448.149,00	2.996.047.647,00		
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.032.205.599,00	1.869.331.956,00		
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	20.000.000,00	19.297.300,00		
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	252.153.468,00	22.145.600,00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hidup (PPLH)			Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). • Kurangnya kesadaran pengusaha dan masyarakat umum terhadap pengelolaan limbah cair.	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	40.000.000,00	30.705.000,00		
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	1.340.435.724,00	1.287.395.878,00		
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	83.045.060,00	76.038.805,00		
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	40.000.000,00	33.289.980,00		
			Program Pengelolaan Persampahan	5.315.760.500,00	5.239.222.109,00		
6	Administrasi Kependudukan	Dinas Kependuduka	Program penunjang urusan Pemerintahan	7.267.949.157	7.098.757.057	• Masih terdapatnya masyarakat yang	• Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan

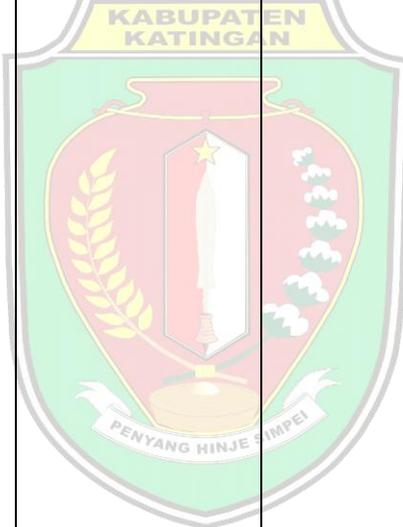


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Capil	n dan Pencatatan Sipil	daerah Program Pendaftaran Penduduk. Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	99.997.790 99.997.790 99.997.790	92.566.000 96.108.000 96.017.000	<p>belum memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal itu disebabkan faktor jarak tempuh dan biaya transportasi dari tempat asal mereka tinggal ketempat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berada pada Disdukcapil sangat jauh yaitu berada pada di Ibu Kota Kabupaten Katingan di Kasongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan pelaksanaan putusan MK No. 18/PUU-IX/2013 tentang 	<p>pencatatan sipil kepada masyarakat dengan metode jemput bola kepada masyarakat khususnya yang berada di desa terpencil, sehingga masyarakat tersebut cukup menunggu di tempat asal mereka, metode jemput bola juga mengurangi beban biaya masyarakat karena tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di Kasongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Membentuk UPTD di setiap Kecamatan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di kecamatan untuk mengurangi jumlah antrian berkas pembuatan dokumen



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						pelaporan kelahiran yang malampaui batas satu tahun sejak tanggal 1 Mei 2013 tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri tetapi langsung diproses di dukcapil Kabupaten/Kota, maka untuk penerbitan akte kelahiran tidak bisa selesai saat itu sebab proses pembuatan terpusat Di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dalam proses pelayanan akan menyebabkan banyak antrian pengurus	Kependudukan dan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						berkas permohonan pembuatan akte kelahiran dari masyarakat.	
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.346.491.676	5.102.318.037	Tidak Ada Permasalahan yang berarti terkait pelaksanaan penyerapan anggaran dengan tingkat penyerapan anggaran di atas 90% yaitu 96,42 % dengan realisasi fisik kegiatan rata rata sebesar 100 %. mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti penerbitan kebijakan terkait,	Rencana Tindak Lanjutnya <ul style="list-style-type: none"> • Upaya peningkatan kapasitas SDM pelaksana baik ditingkat SOPD dan Desa melalui Bimtek, Pelatihan, Koordinasi dan Konsultasi • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan secara berkesinambungan, baik pada level SOPD maupun pada Level desa dengan melibatkan stakeholder seperti kejaksaan Negeri, BPKP dan Inspektorat
			Program Penataan Desa	1.267.500.000	1.224.786.540,97		
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	500.000.000	492.186.420		
			Program Peningkatan Kerjasama antar Desa	117.788.700	117.788.700		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	1.350.000.000	1.337.688.242	pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> Rancang Bangun Sistem Basis data yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan Percepatan pelaksanaan pengentasan Desa Tertinggal melalui berbagai program dan kegiatan yang lebih inovatif
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota, Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal,	178.200.000	134.878.500	<ul style="list-style-type: none"> karena Pembayaran jasa kader PPKBD dan sub PPKBD secara CMS melalui Bank Kalteng (Kerja Sama) namun ada kader yang tidak memiliki rekening sehingga tidak dapat direalisasikan. karena adanya 	<ul style="list-style-type: none"> Menginstruksikan seluruh kader supaya membuat rekening masing-masing Melakukan permintaan terhadap perubahan perencanaan dan DPA sehingga pelaksanaan kegiatan bisa tepat waktu Penegasan kepada Camat dan Kades supaya tidak mengganti Kader di Lapangan
				1.097.500.000	663.788.009		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	483.000.000,00	454.500.000,00	pergeseran/perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana	<ul style="list-style-type: none">sesuai dengan kebutuhan sehingga pelaksanaan kegiatan bisa maksimal
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Kota	269.553.000	238.535.500	<ul style="list-style-type: none">Karena ada pergantian Kader oleh Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none">Menkaji ulang kembali kegiatan tersebut sehingga untuk tahun berikutnya tidak dianggarkan
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	1.130.750.000	274.603.000	<ul style="list-style-type: none">Karena Kebijakan Pemerintah Pusat (Kemenduk/BKKBN)karena untuk wilayah kecamatan katingan hilir kegiatan dilaksanakan namun tidak di SPJ kan.Kegiatan sudah dilaksanakan dan di SPJ kan di beberapa	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan percepatan kegiatan sehingga SPJ bisa optimal dan tepat waktu dan menambah tenaga pelaksana dilapangan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik.Melakukan pengawasan dan kontrol yang lebih ketat untuk memecah permasalahan di kemudian hari



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						kampung KB oleh bidang namun setelah diverifikasi bag.keuangan terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan SPJ yang disampaikan sehingga bidang tidak dapat melakukan perbaikan karena penyampaian SPJ sudah diakhir tahun	
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	7,653,944,112	6,713,786,485	Tidak Ada Permasalahan yang berarti terkait pelaksanaan penyerapan	Akan disesuaikan dengan Permenhub 61 Tahun 2021



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengelolaan Pelayaran	400,000,000	399,482,900	anggaran dengan tingkat penyerapan anggaran di atas 95,48 %.	
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	5.881.244.130,-	5.672.278.586,-	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Literasi Digital Masyarakat dan tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mengakses dan memanfaatkan informasi dengan baik, terutama dalam memfilter berita hoaks. • Terbatasnya Sumber daya dan Anggaran • Masih rendahnya keterampilan dan tingkat literasi digital ASN dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan program edukasi digital secara berkala, seperti seminar atau pelatihan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengakses dan memverifikasi informasi. • Memanfaatkan platform digital seperti website, media sosial, dan aplikasi seluler untuk menyebarkan informasi secara efektif dan interaktif. • Menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung keberlangsungan program komunikasi publik, termasuk pelatihan tenaga komunikasi di daerah. • Bekerjasama dengan
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	939.602.296,-	907.291.977,-		
			Program Aplikasi Informatika	4.328.321.669,-	4.297.054.995,-		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>di bidang TIK</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang IT, seperti pemrograman dan jaringan• Jaringan internet belum merata (masih ada beberapa desa/kelurahan yang masuk kategori lemah dan blankspot sinyal telekomunikasi)• Masih kurangnya pemanfaatan teknologi digital untuk layanan publik dan ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian / Universitas / Lembaga yang kompeten dibidangnya untuk memberikan pelatihan dan literasi digital di bidang TIK untuk ASN dan masyarakat• Merekrut Tenaga Ahli IT dibidang pemrograman dan melaksanakan pelatihan pengelolaan jaringan untuk ASN• Bekerjasama dengan Kemenkomdigi/provider telekomunikasi untuk membangun menara telekomunikasi di daerah-daerah yang masih terkendala jaringan telekomunikasi• Bekerjasama dengan Kemenkomdigi/provider telekomunikasi untuk



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>membangun menara telekomunikasi di daerah-daerah yang masih terkendala jaringan telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan layanan pembangunan/pengembangan aplikasi terpusat di Diskominfo yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli IT Diskominfo • Melaksanakan program Desa Digital untuk mempercepat transformasi digital sampai di tingkat desa
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	<p>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</p> <p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)</p>	55.501.460,00	51.254.775,00	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak koperasi yang belum melaksanakan RAT. • Koperasi plasma banyak mengalami 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya pelatihan RAT. • Perlu adanya koordinasi dengan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) dan penerapan aturan sesuai undang-undang.

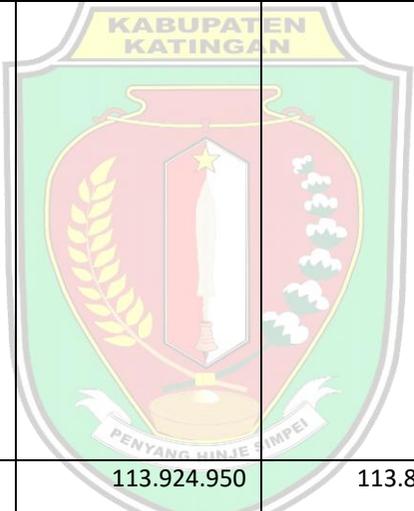


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengembangan Umkm	399.996.889,56	195.725.700,00	<p>permasalahan terkait tata kelola.</p> <ul style="list-style-type: none">• Perlunya penguatan modal bagi koperasi, terutama koperasi non pegawai negeri.• Koperasi yang aktif masih banyak yang belum termasuk sehat.• Minimnya aparatur pembina koperasi.• Koperasi yang aktif kurang inovatif dalam pengembangan usahanya.• UMKM masih kurang inovatif di dalam pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">• Perlu adanya pelatihan penilaian kesehatan koperasi.• Perlu adanya pelatihan aparatur pembina koperasi dan penyuluh koperasi lapangan.• Perlu adanya magang bagi koperasi aktif dan potensial.• Perlu adanya pelatihan dan magang bagi UMKM potensial.• Pendataan UMKM berkoordinasi dengan instansi terkait (BPS, kelurahan).• Perlu ada pendampingan dari tenaga ahli dan bantuan permodalan bagi UMKM potensial.• Perlu adanya peningkatan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						dan pengembangan usaha. <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya data-data dan pemetaan UMKM yang baik. • Program yang sudah berjalan belum disertai dengan pendampingan dan bantuan permodalan bagi usaha yang potensial. 	Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Koperasi.
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	113.924.950	113.852.752	1. Belum adanya kebijakan/regulasi terkait pengembangan iklim penanaman modal terkait. 2. Kurangnya	1. Menyusun kebijakan Perda/Perbup terkait penanaman modal yang lebih transparan dan memberikan insentif bagi investor, seperti pajak dan kemudahan izin usaha.
		Program Pelayanan Penanaman Modal	401.880.000	351.372.282			
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	578.828.000	527.118.420			



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	80.099.520	79.927.163	Infrastruktur Pendukung (Keterbatasan jalan, listrik, dan jaringan internet di beberapa wilayah menghambat investasi). 3. Perizinan yang Masih Kurang Efektif (Meskipun sistem OSS dan si Cantik sudah diterapkan, masih ada kendala teknis dan Kordinatif yang memperlambat proses perizinan. Misalnya Pertimbangan teknis dari Dinas terkait yang terkadang lambat).	2. Meningkatkan Infrastruktur (Mendorong pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama di kawasan strategis investasi). 3. Mempermudah dan Mempercepat Perizinan (Optimalisasi layanan perizinan berbasis digital, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar instansi terkait). 4. Pengembangan SDM (Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan). 5. Melakukan langkah upaya pelayanan bergerak (jemput



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>4. Kurangnya SDM yang Kompeten (Beberapa sektor masih kekurangan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan).</p> <p>5. Pelayanan sudah dilakukan secara Online tetapi tidak semua Kecamatan tersedia jaringan sinyal internet dan Akses Transportasi masih belum memadai untuk datang langsung ke DPMPSTP.</p> <p>6. Masih ada sebagian masyarakat Katingan yang kurang</p>	<p>bola) yang dilaksanakan DPMPSTP ke kecamatan dan desa sebagai Front Office (FO).</p> <p>6. Membuka Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan OPD Kabupaten Katingan, OPD Provinsi, BUMD, BUMN, dan Instansi Vertikal dalam rangka pengintegrasian pelayanan publik secara terpadu sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan serta dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Katingan.</p> <p>7. Perlunya percepatan penetapan RTRW baik di</p>

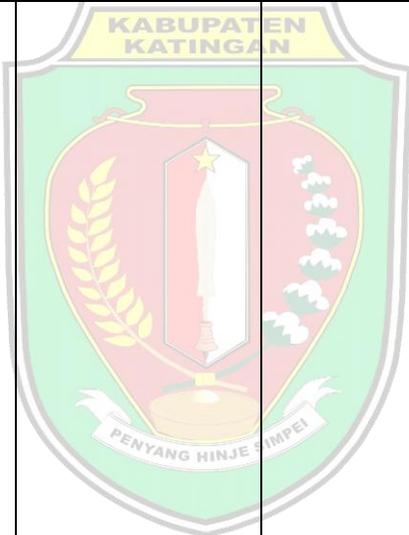


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>mengerti penggunaan teknologi informasi dalam pengurusan perizinan dan pelayanan publik lainnya, serta tempat pelayanan publik masih tersebar di beberapa instansi dan sehingga menjadi kendala bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan, mengingat akses menuju perkantoran tidak tersedia transportasi umum.</p> <p>7. Masih belum terbitnya RTRW di</p>	<p>provinsi maupun kabupaten.</p> <p>8. Percepatan perubahan jumlah/ nilai pungutan pajak melalui perubahan Perda.</p> <p>9. Perlu dilakukan sosialisasi dan promosi serta penerbitan buku peta potensi dan peluang usaha serta pencetakan leaflet book let untuk disebarluaskan.</p>



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						kabupaten dan provinsi. 8. Pajak dan insentif yang kurang mendukung dikarenakan terlalu tinggi pungutannya didalam Perda. 9. Rendahnya minat investor dikarenakan kurangnya sosialisasi dan promosi serta kurangnya pemahaman masyarakat dan biokrat tentang pentingnya investasi serta kurangnya data potensi dan peluang usaha.	
13	Kepemudaan dan	Dinas	Program Penunjang	6.214.801.104	5.845.776.223	• Sarana dan	• Sosialisasi program

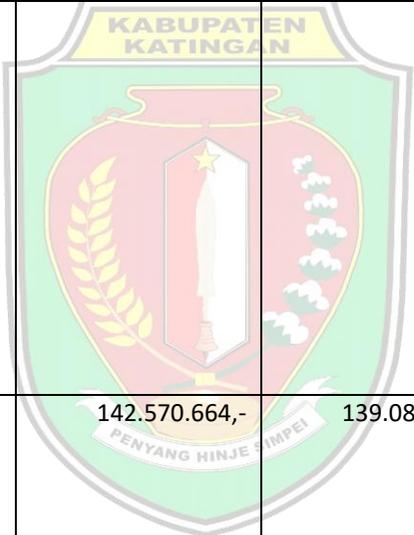


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Olah Raga	Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota			<p>prasarana olahraga yang ada masih kurang memenuhi standart ini dikarenakan kondisi lapangan yang tidak rata, rumput tidak sesuai kondisi lapangan serta peralatan olahraga yang kurang lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan wliayah dan kondisi geografis yang luas, mengakibatkan program pembinaan urusan kepemudaan tidak berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran. 	<p>Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan Kepariwisataan kepada stackholder dan pelaku usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterampilan SDM di bidang masing - masing. • Membangun sarana/prasarana penunjang dan pendukung kegiatan Kepemudaan, dan Keolahragaan di daerah. • Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang berprestasi dibidangnya. • Meningkatkan pembinaan karena pemuda dan olahraga merupakan aset dan menyentuh langsung
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	639.600.000	485.450.000		
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	880.000.000	878.696.500		
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.596.620.000	5.538.593.684		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						<ul style="list-style-type: none">Sarana yang di daerah-daerah terutama lapangan sepak bola belum bisa terawat karena terbatasnya ketersediaan anggaran pemeliharaan dan pembangunan untuk lapangan yang di daerah.	kehidupan masyarakat.
14	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	142.570.664,-	139.080.610,-	<ul style="list-style-type: none">ASN di OPD belum memiliki keterampilan yang cukup dalam membaca dan menginterpretasikan data statistik.Kurangnya tenaga	<ul style="list-style-type: none">Mengadakan pelatihan bagi ASN terkait pengolahan dan analisis data statistik.Merekrut atau menugaskan tenaga ahli dalam bidang analisis data setiap OPDMengembangkan dan mengintegrasikan system informasi pembangunan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>analisis data yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data.</p>	<p>daerah dengan data statistik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan teknologi big data dan analisis prediktif untuk perencanaan pembangunan Mengadakan pertemuan berkala antar OPD dan BPS untuk membahas kebutuhan data dalam perencanaan
15	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	<p>Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</p>	<p>2.647.000.000</p> <p>134.700.000</p>	<p>2.282.317.419</p> <p>133.620.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya dukungan kegiatan kebudayaan akibat keterbatasan anggaran. Masih minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Pembangunan Sarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kebudayaan. Memperbanyak kegiatan - kegiatan bidang seni budaya, sehingga dapat menumbuhkan minat masyarakat dalam melestarikan nilai budaya. Memberikan penghargaan yang memadai bagi para pelaku seni budaya.

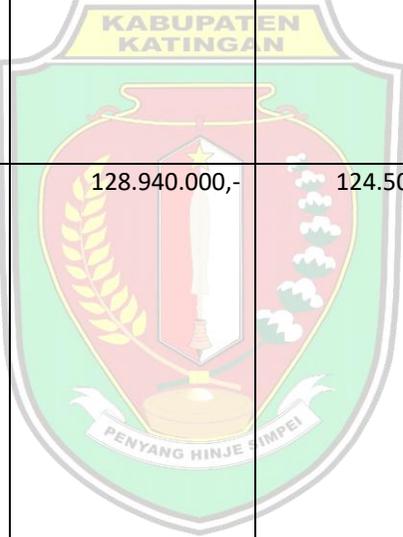


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Prasarana pendukung kegiatan kebudayaan dipandang kurang prioritas karena keterbatasan dana. <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya jumlah SDM yang memenuhi kompetensi ahli cagar budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya.
16	Perpustakaan	Sekretariat Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	716.130.588,00	557.187.779,00	Sisa anggaranya tidak digeser/dialihkan pada saat perubahan anggaran untuk kegiatan lain mengingat waktu setelah perubahan anggaran sangat mepet dengan akhir tahun anggaran sehingga apabila digeser/dialihkan	Untuk anggaran tahun 2025 apabila ada sisa anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan maka akan digeser/dialihkan untuk kegiatan lain tanpa harus menunggu perubahan anggaran murni.
			Program Pengelolaan Arsip	181.662.226,00	175.202.700,00		
			Program Pembinaan Perpustakaan	181.240.000,00	158.928.960,00		
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	219.000.000,00	155.164.098,00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						pada saat perubahan anggaran murni untuk kegiatan lain maka besar kemungkinan tidak dapat dilaksanakan.	
17	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	128.940.000,-	124.504.420,-	<ol style="list-style-type: none">1. ASN tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai ancaman siber dan langkah mitigasi;2. Kurangnya tenaga IT professional yang memiliki keahlian dalam keamanan siber.3. Anggaran pengelolaan keamanan informasi masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pelatihan berkala kepada ASN mengenai keamanan siber.2. Meningkatkan kapasitas tenaga IT pemerintah dengan sertifikasi keamanan siber.3. Menyediakan anggaran untuk pembaharuan perangkat lunak keamanan secara berkala



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						yang ada.	

Sumber: Masing-masing Perangkat Daerah Terkait (data diolah)



C. Pelaksanaan Urusan Pilihan

**Tabel 3.5
Pelaksanaan Urusan Pilihan**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3,939,736,000	3,835,259,800	Masih terdapat Kelompok perikanan yang terlambat dalam penyusunan persyaratan sehingga kesulitan dalam proses pencairan dana	Kelompok perikanan harus sudah membuat proposal dan memenuhi persyaratan yang diharapkan sebelum dilaksanakan CPCL oleh Dinas Pertanian, Pangan dan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			1.281,477,276	1.260678,406			
Program Pengolahan dan			145,815,242	145,670.000			



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
			Pemasaran Hasil Perikanan			hibah.	Perikanan.
2	Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.008.813.338	2.004.086.300	<ul style="list-style-type: none">Sarana dan prasarana penunjang pariwisata sangat terbatas.Masih minimnya kunjungan wisatawan mancanegara.Minimnya informasi terkait destinasi pariwisata di kabupaten katinganKualitas SDM Kepariwisataan di sekitar objek wisata masih kurang	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.Memperbanyak kegiatan-kegiatan promosi wisata.Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok wisata di Desa.Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM Kepariwisataan
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	10.820.000,00	9.950.000,00		
			Program Pemasaran Pariwisata	47.420.000,00	46.918.200,00		
3	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.907.780.313	11.077.887.310	Banyak Kelompok Tani yang tidak dapat memenuhi persyaratan	Diharapkan bagi kelompok tani untuk dapat memenuhi segala persyaratan yang



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
		Pertanian				yang diharapkan sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana	diharapkan dan mempersiapkan proposal kegiatannya sebelum tahun berjalan sehingga pada saat di laksanakan CPCL dapat memenuhi persyaratan yang diharapkan Dinas, baik untuk dana APBD II, APBD I maupun dana APBN
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	678.972.810	606.289.973		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.100.453.195	1.131.918.000		
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	361.575.000	340.997.336		
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	342.853.000	277.585.855		
			Program Penyuluhan Pertanian	198.720.000	176.487.750		

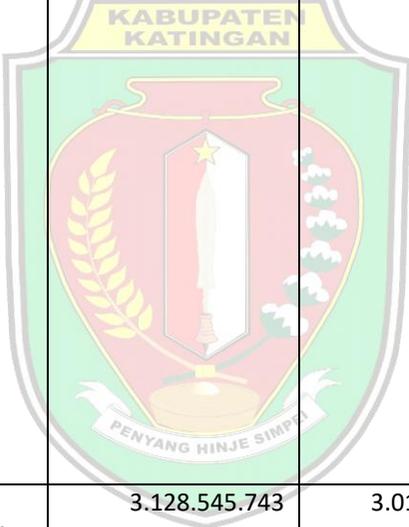


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
4	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	26.099.176,00	26.000.000,00	Masih melakukan penanganan Inflasi	<ul style="list-style-type: none">Peraturan Bupati Katingan Nomor : 26 Tahun 2024 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024, Katingan sudah melaksanakan Operasi Pasar di 9 Lokasi di 9 Kecamatan DTU Rp1.250.000.000,00 realisasi Rp1.250.000.000,00 (100%) dengan jumlah 14.000 PaketPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Sasaran Inflasi Tahun
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.426.390.000,00	1.425.424.638,00		
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	280.710.244,00	279.896.109,00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
							2025, Tahun 2026, Dan Tahun 2027 <ul style="list-style-type: none">Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/697 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pasar Murah dan Pasar Seimbang Tahun 2024Keputusan Bupati Katingan Nomor : 510.21/107 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pasar Murah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024
5	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Transmigrasi	Program Perencanaan Pembangunan Industri	3.128.545.743	3.016.633.893	<ul style="list-style-type: none">Optimalisasi pemberdayaan industri kecil dan	<ul style="list-style-type: none">Memberikan Pelatihan pemberdayaan dan pengembangan IKM.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
		dan Tenaga Kerja	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	40.862.900	27.980.000	Menengah. <ul style="list-style-type: none"> • Belum disusunnya pola pengembangan Industri Kabupaten. • Peralatan yang dipergunakan pelaku industri masih konvensional. • Kurangnya manajemen pemasaran hasil produksi • Minimnya kesadaran pelaku industri dalam pengurusan perizinan Industri. • Sudah Optimalnya penyediaan data industry. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyusunan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten). • Memberikan bantuan sarana/prasarana Industri kepada pelaku Industri. • Melibatkan Pelaku IKM dalam kegiatan Pameran, Temuwicara, studi tiru/magang, dsb. • Melakukan mendorong kepada pelaku IKM untuk mendaftarkan Perizinan Industri. • Sudah dilakukan pendataan pelaku Industri disetiap kecamatan.
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	228.711.945	150.938.700		
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (UPT Industri Hampangen)	405.709.928,00	363.023.490		
6	Transmigrasi	Dinas Perindustrian,	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	97.280.000	96.850.000	Adanya moratorium kawasan transmigrasi	Mencabut kembali moratorium terkait



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
		Transmigrasi dan Tenaga Kerja					
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	54.000.000,00	53.999.100	dan masalah ketersediaan lahan dalam membuka kawasan baru	transmigrasi

Sumber: Masing-masing Perangkat Daerah Terkait (data diolah)



D. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tabel 3.6
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Belanja Operasi	59.981.892.618	55.675.888.675	<ul style="list-style-type: none">Munculnya sengketa tata batas, baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Katingan, disebabkan pada beberapa daerah yang bersengketa belum ada kesepakatan	<ul style="list-style-type: none">Mempercepat dan mendorong penyelesaian administrasi tata batas, antar kecamatan dan desa di Kabupaten Katingan.Pada kasus sengketa lahan, telah dibentuk Tim Kabupaten untuk menangani sengketa kepemilikan lahan baik antar masyarakat dengan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
			Belanja Modal	5.289.454.128	5.262.999.800	batas wilayah.	pemerintah, dengan investor, maupun sengketa karena permasalahan batas wilayah.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
		Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.025.348.482	27.774.013.709	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas pegawai yang masih rendah.• Pelaksanaan tugas belum optimal.• Kurangnya kemauan staf untuk mengembangkan diri.• Disiplin pegawai yang masih rendah.• Kurangnya koordinasi pada semua program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan disiplin dan kualitas staf melalui diklat, bimtek dan lokakarya (workshop).• Meningkatkan pelaksanaan tugas staf melalui pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat waktu.• Meningkatkan sarana dan prasarana agar kualitas kinerja dalam pelayanan bagi Anggota DPRD dapat berjalan secara optimal.• Menambah Pegawai yang bermutu dan mempunyai keahlian.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	25.075.120.771	17.465.583.847		<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan sinkronisasi terhadap semua program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan.
		Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Belanja Operasi	4.459.375.403	4.250.694.868	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Sarana dan Prasarana Kerja. Kurangnya Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja, Rehabilitasi, Perbaikan dan Pembagunan Gedung Baru. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menyebabkan Kurang Efektifnya Pealayanan Publik. Masih kurangnya Ketersediaan Dana 	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan Peningkatan Anggaran Dana untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Peningkatan anggaran dalam Sistem Perencanaan dan Peranggaran Peningkatan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dan Disiplin Bagi ASN Peningkatan Anggaran Bagi Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Kelurahan dan Desa.
			Belanja Modal	653.711.915	615.067.000		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Desa.	
		Kecamatan Marikit	Belanja Operasi	2.756.889.419	2.577.924.321	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja di kecamatan. Masih kurangnya anggaran untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan evaluasi kondisi wilayah Pada saat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengusahakan peningkatan sarana dan prasarana melalui peningkatan anggaran pada sistem keuangan daerah Meningkatkan Jumlah Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada DPA Kecamatan Marikit untuk mengantisipasi
			Belanja Modal	82.668.796	82.500.000		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						merecanakan kegiatan akan dilaksanakan namun pada realisasi dibatasi waktu yang terbatas.	kegiatan harus disusun pada DPA Kecamatan Marikit.
		Kecamatan Sanaman Mantikei	Belanja Operasi	3.138.982.642	3.025.689.17	<ul style="list-style-type: none">Penguasaan tugas yang belum profesional serta penguasaan teknologi yang masih	<ul style="list-style-type: none">Perlu peningkatan SDM dan penempatan sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
			Belanja Modal	479.065.681	477.754.950	terbatas. • Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang di kecamatan. • Masih kurangnya anggaran untuk menjaga dan memperbaiki sarana dan prasarana peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai serta monitoring dan evaluasi kondisi wilayah.	<ul style="list-style-type: none">• Mengusahakan peningkatan sarana dan prasarana melalui peningkatan anggaran pada sistem keuangan daerah.• Menganggarkan pembangunan baru/rehabilitasi bangunan sarana penunjang kecamatan baik melalui instansi terkait atau melalui dana pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Katingan.
		Kecamatan Katingan	Belanja Operasi	5.019.592.629	4.520.486.181	• Masih kurangnya sarana dan	• Mengusahakan peningkatan sarana dan

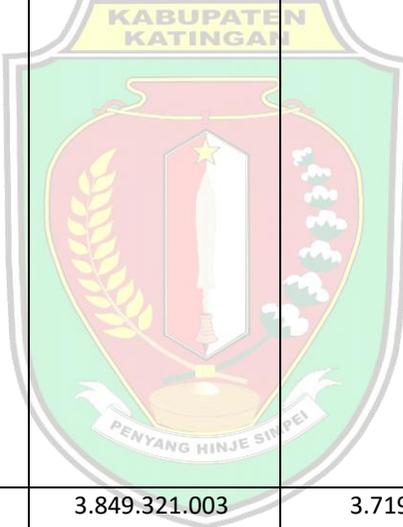


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
		Tengah	Belanja Modal	804.234.073	798.960.300	<p>prasarana penunjang kerja di kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none">Masih kurangnya anggaran untuk menjaga dan memperbaiki sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan atau kapasitas pegawai, serta monitoring dan evaluasi kondisi wilayahRata – rata bangunan Kantor Camat, Rumah Jabatan, Aula perlu mendapat perbaikan khusus dari Pemerintah Kabupaten baik	<p>prasarana melalui peningkatan anggaran pada sistem keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none">Menganggarkan pembangunan baru / rehabilitasi bangunan saraa penunjang di kecamatan baik melalui instansi terkait atau melalui Dana Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Katingan.Memberikan himbauan, arahan dan penjelasan kepada masyarakat terkait pentingnya batas-batas antar wilayah dan menghapus isu-isu serta pemikiran-pemikiran yang tidak benar tentang batas



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						<ul style="list-style-type: none">pembangunan baru atau renovasiMasih kurangnya wawasan dan pengertian masyarakat tentang batas-batas wilayah di kecamatan.Kurangnya tenaga (ASN / THL) yang ditempatkan di kecamatan khususnya yang berada dikecamatan terjauh / terpencil.	<ul style="list-style-type: none">wilayah yang dapat merugikan masyarakat.Perlu dilakukan pemerataan penempatan tenaga kerja (ASN / THL) di kecamatan terjauh / terpencil.
		Kecamatan Katingan Hulu	Belanja Operasi	3.849.321.003	3.719.889.364	<ul style="list-style-type: none">Masih kurangnya sarana dan	<ul style="list-style-type: none">Mengusahakan peningkatan sarana dan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
			Belanja Modal	63.230.320	63.025.918	<p>prasarana penunjang kerja di kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya anggaran untuk menjaga dan memperbaiki sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan atau kapasitas pegawai, serta monitoring dan evaluasi kondisi wilayah• Rata – rata bangunan Kantor Camat, Rumah Jabatan, Aula perlu mendapat perbaikan khusus dari Pemerintah Kabupaten baik	<p>prasarana melalui peningkatan anggaran pada sistem keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none">• Menganggarkan pembangunan baru / rehabilitasi bangunan saraa penunjang di kecamatan baik melalui instansi terkait atau melalui Dana Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Katingan.• Memberikan himbauan, arahan dan penjelasan kepada masyarakat terkait pentingnya batas-batas antar wilayah dan menghapus isu-isu serta pemikiran-pemikiran yang tidak benar tentang batas



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						<p>pembangunan baru atau renovasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya wawasan dan pengertian masyarakat tentang batas-batas wilayah di kecamatan. Kurangnya tenaga (ASN / THL) yang ditempatkan di kecamatan khususnya yang berada dikecamatan terjauh / terpencil. 	<p>wilayah yang dapat merugikan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan pemerataan penempatan tenaga kerja (ASN / THL) di kecamatan terjauh / terpencil.
		Kecamatan Tasik Payawan	Belanja Operasi	3.184.816.686	3.016.583.627	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya sarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengusahakan peningkatan sarana dan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
			Belanja Modal	106.124.333	104.581.700	<p>prasarana penunjang kerja di kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya anggaran untuk menjaga dan memperbaiki sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan atau kapasitas pegawai, serta monitoring dan evaluasi kondisi wilayah.• Rata – rata bangunan Kantor Camat, Rumah Jabatan, Aula perlu mendapat perbaikan khusus dari Pemerintah Kabupaten baik	<p>prasarana melalui peningkatan anggaran pada sistem keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none">• Menganggarkan pembangunan baru / rehabilitasi bangunan saraa penunjang di kecamatan baik melalui instansi terkait atau melalui Dana Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Katingan.• Memberikan himbuan, arahan dan penjelasan kepada masyarakat terkait pentingnya batas-batas antar wilayah dan menghapus isu-isu serta pemikiran-pemikiran yang tidak benar tentang batas



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						<p>menjaga dan memperbaiki sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan atau kapasitas pegawai, serta monitoring dan evaluasi kondisi wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata – rata bangunan Kantor Camat, Rumah Jabatan, Aula perlu mendapat perbaikan khusus dari Pemerintah Kabupaten baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menganggarkan pembangunan baru / rehabilitasi bangunan saraa penunjang di kecamatan baik melalui instansi terkait atau melalui Dana Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Katingan. • Memberikan himbauan, arahan dan penjelasan kepada masyarakat terkait pentingnya batas-batas antar wilayah dan menghapus isu-isu serta pemikiran-pemikiran yang tidak benar tentang batas
		Kecamatan Kamipang	Belanja Operasi	3.379.743.628,13	3.353.541.836		
			Belanja Modal	449.705.702,87	449.038.820		
		Kecamatan Katingan Hilir	Belanja Operasi	5.553.486.824	5.277.740.837		
			Belanja Modal	239.628.300	239.248.30		
		Kecamatan	Belanja Operasi	3.639.344.145	3.453.569.345		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
		Pulau Malan	Belanja Modal	136.161.902	100.160.000	<p>pembangunan baru atau renovasi.</p> <ul style="list-style-type: none">Masih kurangnya wawasan dan pengertian masyarakat tentang batas-batas wilayah di kecamatan.Kurangnya tenaga (ASN / THL) yang ditempatkan di kecamatan khususnya yang berada dikecamatan terjauh / terpencil.	<p>wilayah yang dapat merugikan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">Perlu dilakukan pemerataan penempatan tenaga kerja (ASN / THL) di kecamatan terjauh / terpencil.
		Kecamatan Mendawai	Belanja Operasi	2.835.309.355	2.653.033.318		
			Belanja Modal	33.775.300	31.850.000		
		Kecamatan Bukit Raya	Belanja Operasi	2.717.267.227	2.372.540.273		
			Belanja Modal	164.803.400	138.650.000		
		Kecamatan Petak Malai	Belanja Operasi	2.716.766.799	2.305.792.777		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
			Belanja Modal	37.898.817	37.785.000		
2	Pengawasan	Inspektorat Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	10.118.020.257,00	9.378.326.895,00	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak semua Perangkat Daerah memahami dan mengimplementasikan Manajemen Risiko strategis dan operasional di Unit Kerja masing-masing. Cakupan obyek pengawasan luas sehingga penyelenggaraan kegiatan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan asistensi / pendampingan serta evaluasi pada Perangkat Daerah agar lebih optimal dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko di Unit Kerja masing – masing. Meningkatkan peran aktif seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian agar pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko lebih tepat
			Program Penyelenggaraan Pengawasan.	3.002.840.000,00	2.612.761.297,00		
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	819.035.200,00	382.709.426,00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						tidak mampu menjangkau seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.	sasaran dengan memperhatikan skala prioritas serta terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis dan terintegrasi. <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Rencana Diklat/Bimtek dalam meningkatkan kompetensi APIP sesuai bidangnya.
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,753,631,003	7,595,896,640	<ul style="list-style-type: none"> Karena tidak adanya perubahan murni APBD hanya Perkada sehingga mempengaruhi dalam penyerapan anggaran Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selesai 100%, sedangkan sisa dana yang tidak 	<ul style="list-style-type: none"> Agar dalam penyusunan perencanaan anggaran lebih selektif Perlu disusunnya mapping/jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring dalam kurun waktu satu tahun untuk menghindar menumpuknya pelaksanaan kegiatan pada
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1,190,713,913	901,709,300			
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan		1,910,693,646	1,661,123,339			



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
			Pembangunan Daerah				
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,201,376,400	1,178,780,844	<p>teralisasi adalah sisa belanja lain yang tidak bisa di geser karena tidak ada perubahan anggaran tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">• Karena sebagian besar rincian pada sub kegiatan pelaksanaan monitoring keluar daerah masuk pada perubahan sehingga terkendala batas waktu dalam pelaksanaan kegiatan	triwulan akhir tahun penganggaran



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
4	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.940.951.347,00	25.807.975.061,88	Faktor Internal : <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya SDM yang memahami secara utuh konsep dan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pertanggungjawaban APBD ; Masih lemahnya koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas yang menyangkut administrasi dan peraturan; Kurangnya sarana pendukung dalam upaya pengelolaan, penatausahaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi antara unit yang bertanggungjawab atas penatausahaan dan pelaporan serta membentuk tim kerjasama lintas fungsi yang bertugas untuk memastikan kelancaran proses dan menemukan solusi atas permasalahan yang ada Memastikan penggunaan anggaran tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan Menyediakan informasi pengelolaan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat melalui website BKAD dan media
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	256.803.867.318,00	247.534.232.050,70		
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.712.430.872,00	1.202.939.568,00		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						<p>pertanggungjawaban pengelolaan keuangam dan aset daerah;</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah; <p>Faktor Eksternal :</p> <ul style="list-style-type: none">• Aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIPD) belum terkoneksi antara penatausahaan dan pelaporan sehingga untuk laporan ke pusat masih	<p>sosial lainnya untuk meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas ;</p> <ul style="list-style-type: none">• Menerapkan manajemen resiko di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan• Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kinerja (E-Kinerja) untuk mendukung pengelolaan dan pelaporan kinerja• Melakukan harmonisasi regulasi, baik itu evaluasi atau perubahan peraturan daerah• Mengembangkan dan menerapkan standar operasional prosedur yang jelas dan terukur untuk setiap proses pengelolaan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						<p>digunakan cara manual</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam menjalankan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Pusat belum mempunyai /memiliki perpanjangan tangan di propinsi sehingga pada tahapan konsultasi dan koordinasi mengalami kesulitan.• Koneksi jaringan internet belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh	keuangan daerah.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						<p>wilayan Kabupaten Katingan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal berdampak pada Peraturan Daerah yang mendorong timbulnya biaya tinggi dan menghambat investasi didaerah dan pengelolaan keuangan daerah• Kondisi politik dan keamanan daerah• Masalah yang timbul dengan diterapkannya sistem penganggaran	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						<p>berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki</p> <ul style="list-style-type: none">Regulasi yang ada saat ini belum mampu mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.	



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	6.402.684.416	6.053.281.695	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya Tenaga Pegawai Harian Lepas, sebanyak 3 orang karena diangkat menjadi PPPK dan tidak diperbolehkannya pergeseran anggaran dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal. Pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan IV, tidak dapat terlaksana dikarenakan 	Penyusunan Anggaran untuk Sub Kegiatan akan disusun dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah PHL yang tersisa.
		Program Kepegawaian Daerah	4.013.582.663	3.535.890.339			
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	628.316.000	328.047.860			



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						<p>terkendala permohonan Izin rekomendasi dari Pejabat Bupati Katingan kepada Menteri Dalam Negeri tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui sehingga penggunaan anggaran untuk jasa konsultasi dan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi/penilaian kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tidak dapat terlaksana</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Seleksi	



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						pengadaan CASN yang sesuai jadwal resmi dari BKN dilaksanakan 3 (tiga) seleksi dalam TA. 2024, dengan perhitungan jumlah pelamar 3 (tiga) kali jumlah formasi yang ditetapkan, namun pelaksanaan seleksi kompetensi dasar lebih singkat dari dikarenakan jumlah pemalar tidak sebanyak perhitungan dalam perencanaan, kemudian pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK	



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9
						<p>Tahap Pertama, digabung menjadi satu dengan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Orientasi/Pelatihan Dasar bagi PPPK berdasarkan Peraturan LAN nomor 15 Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan saat ini pelatihan dasar hanya untuk CPNS	

Sumber: Masing-masing Perangkat Daerah Terkait (data diolah)



3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menyikapi dan menerapkan beberapa kebijakan strategis tahun 2024 beberapa Kebijakan Strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, dirumuskan dengan mengacu kepada beberapa dokumen perencanaan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan tahun 2024;
2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026,
dan
3. Kondisi lingkungan eksternal dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Kebijakan strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Katingan Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Pelaksanaan RPD dalam bentuk RKPD bertujuan agar target-target Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka pencapaian visi dan misi dapat tercapai. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Katingan tahun 2024 sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 sebagai berikut ini :



Tabel 3.7
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Katingan 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
1	Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan					
1.1	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan	1. Penguatan ekonomi lokal (pertanian, perdagangan, industri kecil dan pariwisata) untuk mendorong keberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi	 1. Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan. 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok 3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha 4. Peningkatan daya tarik pariwisata 5. Peningkatan kapasitas kewirausahaan, UMKM dan koperasi	■	■	■



NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
			6. Peningkatan daya tarik dan iklim investasi yang kondusif serta industrialisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	■	■	■
2	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing					
2.1	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	2. Penguatan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif dan terampil	7. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan menerapkan prinsip Merdeka Belajar.	■	■	■
			8. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	■	■	■
			9. Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan pelaksanaan perlindungan sosial	■	■	■
			10. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan pemberdayaan tenaga kerja	■	■	■



NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
			11. Peningkatan kualitas anak dan peran perempuan dalam pembangunan	■	■	■
3	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata					
3.1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	3. Penguatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur daerah yang menjangkau seluruh wilayah	12. Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten	■	■	■
			13. Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum	■	■	■
			14. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	■	■	■
			15. Peningkatan kualitas dan cakupan irigasi daerah	■	■	■
			16. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melalui penyediaan akses perumahan dan permukiman layak	■	■	■
4	Terwujudnya kondisifitas wilayah dan masyarakat yang berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan)					
4.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal.	4. Pemantapan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui upaya pendekatan sosial budaya dan moderasi beragama	17. Pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan fasilitasi kerukunan umat beragama	■	■	■
			18. Peningkatan koordinasi dan pengawasan trantibumlinmas dalam penegakan	■	■	■



NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
			peraturan daerah			
			19. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan ekspresi kebudayaan dan kearifan lokal	■	■	■
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan					
5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	5. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana	20. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3	■	■	■
			21. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	■	■	■
			22. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	■	■	■
5.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah.		23. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	■	■	■



NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
			24. Peningkatan pengelolaan mitigasi bencana	■	■	■
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel					
6.1	Meningkatnya kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	25. Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel	■	■	■
			26. Penguatan implementasi manajemen ASN	■	■	■
			27. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah	■	■	■
6.2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		28. Penguatan implementasi SPBE dan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	■	■	■
			29. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	■	■	■
			30. Penguatan pembinaan dan pengawasan desa	■	■	■



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026

Sumber: RPD Kabupaten Katingan 2024-2026

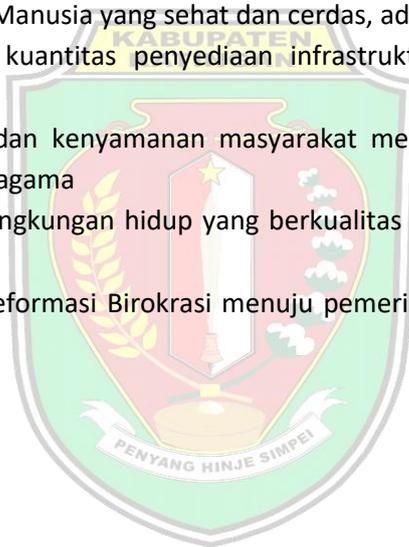




Kebijakan strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024 berpedoman pada RPD Kab. Katingan Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 disusun dengan telaahaan terhadap RKPd Kabupaten Katingan tahun 2024.

Fokus/tema pembangunan mengarah pada “Mendorong pembangunan infrastruktur pelayanan publik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan” Prioritas pembangunan Tahun 2024 mengacu pada RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 antara lain :

1. Penguatan ekonomi lokal (pertanian, perdagangan, industri kecil dan pariwisata) untuk mendorong keberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi
2. Penguatan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif dan terampil
3. Penguatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur daerah yang menjangkau seluruh wilayah
4. Pemantapan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui upaya pendekatan sosial budaya dan moderasi beragama
5. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana
6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel





3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Berdasarkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Katingan Tahun Anggaran 2023 Nomor 170/221/DPRD-KAT/IV/2024, maka dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2023

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Agar Dalam Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Melakukan Terobosan Dan Melakukan Sosialisasi Yang Lebih Gencar Terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Pos PAD Lainnya Karena Pada Tahun 2023 Meskipun Terjadi Penambahan Dalam Perubahan Apbd Sebesar Rp. 25.341.838.499,00 Atau Sebesar 23% Akan Tetapi Pada Akhir Tahun 2023 Hanya Terealisasi Sebesar Rp. 97.945.340.251,68 Dari Target Rp. 137.542.324.299,00 Atau Hanya 71,21%.	<ol style="list-style-type: none">1. Sepakat bahwa untuk mencapai target yang telah ditentukan harus dibarengi dengan upaya mengedukasi wajib Pajak dan Retribusi dengan Sosialisasi yang lebih gencar terhadap agar pemahaman akan kewajiban tanggung jawab mereka lebih baik dan meningkat sehingga menimbulkan kesadaran/kepatuhan.2. Mengupayakan usaha penagihan-penagihan daerah kepelosok yang memiliki potensi dan dilaksanakan seoptimal mungkin, dengan memberdayakan sumber daya yang ada dan biaya yang terbatas serta melibatkan berbagai leding sektor bahkan bisa lintas sektor yang	<ol style="list-style-type: none">1. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara aktif maka akan menambah pemahaman baru lagi bagi masyarakat khususnya wajib pajak dan retribusi serta wajib pungut. Sosialisasi Pasif pun perlu dilakukan baik melalui spanduk, stiker atau brosur-brosur atau melalui pesan-pesan singkat di Wab, WA Grup, dan sebagainya yang di bagikan.2. Dengan mengoptimalkan tindakan penagihan yang dilakukan bersama team dapat mendorong kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya.3. Data atau informasi yang akurat mengenai potensi-potensi pajak, retribusi dan Pos PAD yang ada maupun yang belum masuk data base akan membantu dalam pengambilan keputusan penentuan target PAD yang akan dibuat.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>berkepentingan.</p> <p>3. Data pajak, retribusi dan Pos PAD yang telah ada selalu terUp-Date dengan baik dan benar serta mencoba mencari data-data baru dari potensi yang dapat digali untuk menambah pemasukan PAD.</p>	
2	<p>Memperhatikan Jumlah Penurunan Kemiskinan Yang Cukup Menggembirakan Tahun 2023 Sebesar 4,95% Dari Tahun 2022 Sebesar 5,50% Atau Berkurang Sebesar 0,55%. Kami Berharap Agar Pemerintah Daerah Terus Melakukan Upaya Pengurangan Angka Kemiskinan, Tidak Terlana Dengan Hasil Yang Di Capai Pada Tahun 2023.</p>	<p>Pemerintah Daerah selama ini sudah menjalankan beberapa program-program pelanggungan kemiskinan guna menurunkan angka kemiskinan, diantaranya rumah tangga miskin penerima program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, dan rumah tangga miskin penerima program bantuan pangan non tunai, bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, pelatihan kerja dan produktifitas kerja, pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur</p>	<p>Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong kantong kemiskinan.</p>



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak. Dimana dapat dilakukan dengan penajaman program kemiskinan agar lebih tepat sasaran. Program tersebut dilaksanakan oleh OPD teknis pengampu program pengentasan kemiskinan.	
3	Dengan Masih Tingginya Angka Stunting Sebesar 34%, Agar Pemerintah Daerah Melakukan Langkah-Langkah Secara Komprehensif Melibatkan Semua Sektor Dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting Yang Ada.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan Evaluasi : Melaksanakan Pertemuan pemantauan evaluasi intervensi spesifik lintas sektor dengan tujuan menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan dan merumuskan strategi perbaikan guna mencapai target penurunan angka stunting di Kabupaten Katingan2. Penguatan Kelompok Pendukung ASI : Kegiatan ini dilaksanakan guna menjembatani para ibu untuk mendapatkan informasi serta proses belajar aktif tentang memberikan ASI yang tepat dan benar, memberikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita (lama intervensi sesuai kriteria masalah gizi menurut juknis Kemenkes) dan Bumil KEK (Selama 120 hari) .2. Balita yang mengalami stunting dengna komplikasi dilakukan tindakan rujukan ke rumah sakit untuk mendapatkan intervensi dan pemeriksaan rutin oleh dokter spesialis anak mengenai pertumbuhan sehingga dapat dilakukan pemantauan dan perkembangan agar lebih maksimal.3. Pemberian susu dan telur ditujukan bagi balita gizi kurang dan balita berat badan kurang di wilayah Kabupaten Katingan sebagai sumber protein yang dapat mendukung tumbuh kembang anak balita.4. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) terus dilakukan dan ditujukan bagi remaja putri dan calon pengantin untuk



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>motivasi dan dukungan psikologis kepada ibu dan keluarganya sehingga menimbulkan rasa percaya diri pada ibu menyusui.</p> <p>3. Gempur Stunting : Gempur Stunting yaitu Gerakan Pemuda Remaja Peduli Stunting, pemuda remaja sebagai kelompok potensial dalam upaya pencegahan stunting berperan dan turun langsung membantu dengan memberikan bantuan langsung bagi balita yang mengalami stunting di wilayah Kabupaten Katingan.</p> <p>4. Barigas Katingan : Barigas Katingan yaitu Babinsa hindari dan cegah stunting di Kabupaten Katingan, kegiatan yang dilakukan berupa pemberian bantuan nutrisi oleh Babinsa bagi balita stunting di wilayah kerjanya masing-masing di Kabupaten Katingan.</p>	<p>mengatasi sejak dini permasalahan anemia, bagi ibu hamil yang wajib mendapatkan dan mengonsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan.</p> <p>5. Imunisasi sebagai langkah kesehatan penting dan efektif untuk melindungi anak-anak terus dilakukan dan pemeriksaan kehamilan guna mendeteksi adanya komplikasi kehamilan yang mungkin dialami ibu selama masa kehamilan.</p>



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi : Penyampaian informasi, edukasi serta dukungan tentang upaya pencegahan stunting melalui TPK (Tim Pendamping Keluarga) kepada ibu hamil, catin, dan keluarga yang rawan stunting untuk mendeteksi faktor risiko stunting serta membantu pemerintah desa dalam perencanaan program kesehatan yang lebih baik.	
4	Memperhatikan Angka Pengangguran Di Kabupaten Katingan Yang Masih Cukup Besar Di Tahun 2023 Sebesar 5,30% Dibanding Tahun 2022 Sebesar 5,33% Atau Berkurang Hanya Sebesar 0,03%. Agar Pemerintah Daerah Terus Melakukan Upaya Peningkatan Menciptakan Lapangan Kerja Baru Seperti Proyek Padat Karya Dan Pelatihan-Pelatihan Di Berbagai Bidang Bagi Masyarakat Katingan Serta Mendorong Masuknya Investasi Baru.	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan program penempatan tenaga kerja melalui kegiatan perluasan kesempatan.2. Melaksanakan job fair / bursa kerja3. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang sesuai di Kabupaten Katingan.	<ol style="list-style-type: none">1. Mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing, agar dapat terserap oleh dunia usaha dan tersedia Informasi Pasar Kerja Online Dinas Pengampu : Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
5	Dalam Upaya Memperlancar Arus Transportasi Darat Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Harus Melakukan Perbaikan Jalan Dan Jembatan Yang Rusak, Serta Membuka Dan Meningkatkan Jalan Baru Sehingga Konektivitas Jalan Darat Dapat Terbuka Untuk Seluruh Kecamatan Yang Ada Di Kabupaten Katingan. Terutama Untuk Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Bukit Raya, Serta Jalan Tembus Antar Desa Yang Dianggap Penting Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Katingan.	1. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan yang <i>leading sector</i> nya Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan melalui beberapa Sub Kegiatan diantaranya Pemeliharaan Rutin Jalan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan diharapkan melalui Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Berkala Jembatan kerusakan-kerusakan kecil dapat ditangani dengan segera/ Fast Respon sehingga tidak berakibat terjadinya gangguan terhadap kelancaran arus transportasi di Kabupaten Katingan, sedangkan kerusakan besar dan berat ditangani melalui pemeliharaan berkala dan untuk peningkatan lapisan permukaan	1. Mengantaisipasi Terjadinya kerusakan jalan yang dapat mengganggu akses transportasi darat di kabupaten katingan/ menjaga akses jalan tetap fungsional 2. Membuka akses jalan baru selain di danai APBD juga melalui mou dengan PBS dan Perusahaan lainnya sehingga membantu meringankan beban APBD.



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>jalan melalui rekonstruksi jalan.</p> <p>2. Untuk pembukaan akses jalan baru dilakukan melalui Sub Kegiatan Pembangunan Jalan namun dengan keterbatasan anggaran maka dilakukan Upaya antarlain dengan melibatkan pihak swasta seperti Perkebunan Besar Sawit (PBS) untuk turut serta berkontribusi dalam membuka akses jalan pada daerah Perkebunan yang dikerjakannya</p>	
6	<p>Pemerintah Derah Kabupaten Katingan Agar Memperhatikan Penanggulangan Sampah Yang Tidak Tertangani Dengan Baik, Memperhatikan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi Atau Saluran Air, Sehingga Menciptakan Lingkungan Yang Sehat Bagi Masyarakat Kabupaten Katingan.</p>	<p>1. Memberikan edukasi pengelolaan sampah baik itu berupa sosialisasi secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat.</p> <p>2. Mengadakan kegiatan lomba fotostory.</p> <p>3. Melakukan kegiatan pembersihan sampah di sekitar jalan ke arah Desa Baun Bango serta menempatkan bak ambrol dan kegiatan jumat beriman</p>	<p>1. Secara langsung melalui sosialisasi pembuatan pupuk organik dari sampah rumah tangga dan secara tidak langsung pembuatan spanduk larangan membuang sampah diluar bak amrol.</p> <p>2. Lomba fotostory tentang pengelolaan sampah yang ditunjukan melalui gambar yang diikuti oleh seluruh pelajar di Kota Kasongan.</p> <p>3. Menginspirasi masyarakat untuk tidak membuang sampah di kanan kiri jalan dan menciptakan suasana jalan yang bersih dari sampah.</p>



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
7	Memperhatikan Indeks Capaian Mcp (Monitoring Ceter For Prevention) Tahun 2022 (83%), Tahun 2023(78%) Dan Spi (Survei Penilaian Integritas) Tahun 2022 (69%), Tahun 2023 (68%) Oleh Kpk Ri Diketahui Bahwa Kabupaten Katingan Tahun 2023 Capaiannya Menurun Dibanding Tahun 2022. Untuk Itu Agar Pemerintah Daerah Mendorong Semua Opd Untuk Memenuhi Dokumendokumen Aksi Mcp Dan Proaktif Pada Spi Tahun 2024.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan upaya atas peningkatan indeks capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) Tahun 2024 melalui rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi capaian indikator secara berkala bersama dengan Perangkat Daerah serta Penunjukan Admin MCP di perangkat daerah elemen dalam area intervensi.2. Menerbitkan Surat Edaran terkait Pemenuhan Data Populasi Sampel Internal dan Eksternal/Pengguna Layanan.3. Menghimbau Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan agar melakukan sosialisasi melalui Surat / Spanduk / Banner serta media lainnya terkait partisipasi dan keaktifan Pegawai yang menjadi sampel Internal dan masyarakat pengguna layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Hasil Penilaian KPK atas Indeks Capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) pada Tahun 2024 yaitu 87 (meningkat dari Tahun 2023 yaitu 78).2. Berdasarkan Hasil Penilaian KPK atas Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024 mendapatkan skor/indeks yaitu 74 (meningkat dari Tahun 2023 yaitu 68).



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		sebagai sampel eksternal.	
8	Penempatan Tenaga Guru Termasuk Guru Agama Dan Tenaga Kesehatan Agar Dapat Dilakukan Pemerataan. Sehingga Kegiatan Belajar Mengajar Dan Pelayanan Kesehatan Dapat Terlaksana Dengan Baik.	<ol style="list-style-type: none">1. Penempatan guru adalah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Aplikasi RTG (Ruang Talenta Guru) dengan menyesuaikan pada data pokok kependudukan2. Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing Fasilitas Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Aplikasi RENBUT (Rencana Kebutuhan) Tenaga Kesehatan.3. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mengupayakan pemenuhan tenaga melalui Pengusulan dan pemenuhan Tenaga Kesehatan dari Tenaga Penugasan Khusus (Nusantara Sehat) yang pemenuhan tenaganya	<ol style="list-style-type: none">1. Agar tertatanya penempatan sesuai dengan kebutuhan guru dan pemerataan penempatan.2. Agar penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan wilayah/daerah yang sangat memerlukan fasilitas kesehatan.3. Kurang optimalnya dalam perencanaan kebutuhan serta pembagian dalam pemerataan dari jumlah dan kualitas khususnya tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan BKPSDM sudah berkolaborasi dalam hal pengusulan pengisian tenaga kesehatan sesuai standar melalui penerimaan CPNS dan PPPK dibantu dengan Sistem Perhitungan Renbut (Rencana Kebutuhan) milik Kementerian Kesehatan yang pengusulan dan perencanaan kebutuhannya sudah dibantu sistem aplikasi dan disesuaikan dengan standar serta kebutuhan Puskesmas. Selain itu, Pemda melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan melalui Penugasan Khusus Daerah, namun keterbatasan anggaran untuk penggajian dan minimnya minat pengisian tenaga di daerah terpencil dan sangat terpencil menjadi beberapa kendala dalam hal pemenuhan dan



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		difasilitasi langsung melalui Kementerian Kesehatan.	pemerataan tenaga kesehatan.
9	Agar Pemerintah Daerah Melakukan Terobosan - Terobosan Baru Dibidang Pertanian Dari Sisi Pemanfaatan Hasil Produksi Pertanian Sehingga Lebih Menguntungkan Bagi Petani Di Kabupaten Katingan.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung penuh upaya untuk melakukan terobosan baru di bidang pertanian, khususnya dalam hal pemanfaatan hasil produksi agar lebih menguntungkan bagi petani. Beberapa langkah strategis yang akan diambil meliputi: 1. Pengembangan Industri Hilir: Mendorong investasi dalam pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, seperti produk makanan olahan atau komoditas ekspor. 2. Pelatihan dan Pendampingan Petani: Memberikan pelatihan kepada petani tentang teknologi modern dan manajemen pascapanen untuk meningkatkan	Melalui langkah-langkah ini, diharapkan petani di Kabupaten Katingan dapat memperoleh hasil Produksi pertanian yang lebih optimal dan meningkatkan kesejahteraannya. 1. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. 2. Meningkatkan kemampuan petani tentang teknologi modern dan manajemen pascapanen untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian, 3. Dalam rangka meningkatkan pemasaran hasil pertanian secara lebih luas, baik secara digital maupun konvensional 4. Dalam rangka mendukung distribusi hasil pertanian yang lebih baik, 5. Dalam rangka perencanaan pertanian yang lebih baik guna memberikan dasar data yang akurat untuk perencanaan dan pengambilam keputusan di sektor pertanian.



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>efisiensi dan kualitas hasil melalui balai penyuluh pertanian (BPP) yang berada di tiap kecamatan.</p> <p>3. Kemitraan dengan Swasta: Membentuk kerja sama dengan pihak swasta atau startup agritech untuk pemasaran hasil pertanian secara lebih luas, baik secara digital maupun konvensional.</p> <p>4. Pembangunan Infrastruktur: Memperbaiki infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi untuk mendukung distribusi hasil pertanian yang lebih baik.</p> <p>5. Mengembangkan LAHSATAGIS (Lahan Pertanian Satu Peta Berbasis GIS : suatu aplikasi untuk memetakan seluruh lahan pertanian di wilayah Kabupaten Katingan tersebut secara digital. Peta berbasis GIS yang memuat informasi</p>	



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		lahan pertanian secara komprehensif, memberikan dasar data yang akurat untuk perencanaan dan pengambilam keputusan di sektor pertanian.	
10	Agar Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel.	1. Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024 yang mencakup kegiatan Pengawasan Desa, Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, serta	1. Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2023 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Hasil Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Level 3 dengan Skor 3,00. 3. Penilaian Maturitas SPIP 2024 pada Level 2 (Berkembang) dengan Skor 2,940 4. Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 2 dengan Skor 2,669 5. Penilaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Level 2 dengan skor 2,424 6. Indeks MCP KPK atas Indeks Prestasi Kerja Daerah Monitoring Center For Prevention (IKPD MCP) Tahun 2024 yaitu 87 7. Perencanaan kinerja harus memfokuskan pada pencapaian hasil yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ini berarti setiap kegiatan yang direncanakan harus



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>2. Pada tahun 2024 melaksanakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi tahun 2023 antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Mereviu perencanaan kinerja agar tetap mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang ada serta memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (result oriented), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (integrated development plan), mekanisme perjenjangan kinerja,</p>	<p>dapat memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh publik. Dengan melakukan reviu secara berkala, diharapkan perencanaan kinerja yang ada dapat lebih efektif, efisien, dan mampu memenuhi tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif seperti ini, laporan akuntabilitas kinerja akan lebih informatif, berbasis data yang valid, dan memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, serta langkah-langkah untuk perbaikan di masa depan. Memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang nyata dan terukur. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini akan membantu meningkatkan pencapaian target kinerja secara berkelanjutan.</p>



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>serta kualitas pemantauan dan evaluasi kinerja;</p> <p>b. Mereviu kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup, sehingga dapat menjawab isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Katingan. Implikasinya, manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan dapat berdampak langsung bagi Masyarakat;</p> <p>c. Melakukan reviu dan perbaikan narasi kinerja pada dokumen perencanaan level pusat maupun unit kerja untuk memastikan kejelasan substansi kinerja dan/atau kondisi yang ingin</p>	



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>dicapai;</p> <p>d. Memastikan reviu dan perbaikan untuk seluruh dokumen IKU utamanya pada PD dengan memastikan keberadaan definisi operasional yang jelas, rumus perhitungan dan sumber data yang sesuai dan relevan dengan substansi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan</p> <p>e. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan cara aktif dan update menyampaikan pengukuran capaian kinerja dan pimpinan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk pengawasan</p>	



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;</p> <p>f. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik;</p> <p>g. Memperbaiki kualitas dokumen laporan akuntabilitas kinerja level pusat dan unit kerja, diantaranya dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja terhadap target kinerja akhir periode Renstra. Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara</p>	



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>lebih mendalam dan spesifik/rinci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun selanjutnya</p> <p>h. Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LAKIP OPD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya</p>	



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		i. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran Langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkat pencapaian seluruh target kinerja.	
11	Agar Pemerintah Daerah Lebih Meningkatkan Belanja Modal Dan Mengurangi Belanja Operasional Guna Meningkatkan Belanja Publik Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Katingan.	1. Belanja Prioritas Daerah dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Akan diarahkan untuk penguatan Belanja Infrastruktur Publik. 2. Pengendalian Belanja Pegawai dan Barang/ Jasa	Rata – Rata Pemda masih belum memenuhi rasio yang ditetapkan (minimal 40%) untuk Infrastruktur Pelayanan Publik.
12	Agar Pemerintah Daerah Melakukan Penyesuaian Anggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Agar Tidak Melampaui Dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan.	Penyesuaian Pembebanan Sumber Dana untuk Tambahan Penghasilan Pegawai dari DAU ke PAD	Pembayaran TPP ASN akan diformulasikan berdasarkan Kinerja PAD.



BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Katingan tidak memperoleh anggaran melalui kegiatan yang bersumber Dana Tugas Pembantuan. Perangkat Daerah seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan mendapatkan tambahan dari SILPA Dana Bagi Hasil Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pada Tahun Anggaran 2024, BPBD Kabupaten Katingan juga melaksanakan kegiatan yang berasal dari Dana Hibah pada tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 4.1
Laporan Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR)
Kabupaten Katingan

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi		Kendala	Langkah Penyelesaian
			RP	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	358,786,650.00	314,927,150.00	88	1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang di kehendaki Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. 2. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi 3. Belum optimalnya	1. media komunikasi sosial yang ada secara efektif sebagai sarana informasi dan komunikasi yang terpadu dan terintegrasi. 2. Mengajukan proposal pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Bekerja sama dengan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk penyediaan peralatan dan logistik bantuan untuk korban bencana. 3. Berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder yang ada (instansi vertikal, SOPD terkait, pihak swasta dan
2	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	676,685.00	0.00	0		
3	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan	48,800,000.00	28,276,800.00	58		
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	291,920,000.00	291,678,000.00	100		
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -	95,148,916.00	94,540,000.00	99		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi		Kendala	Langkah Penyelesaian
			RP	%		
1	2	3	4	5	6	7
6	Bahan Cetak				koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana. 4. Adanya perubahan iklim yang mengakibatkan intensitas terjadinya bencana di daerah semakin tinggi. 5. Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana.	masyarakat). 4. Mengadakan Posko siaga dan rutin melaksanakan patroli dengan instansi terkait untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang lebih besar lagi.
6	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	428,349.00	0.00	0		
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	300,000,000.00	0.00	0		
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	270,670,000.00	216,316,587.00	80		
9	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	210,640.00	0.00	0		
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	543,731,946.00	537,900,000.00	99		
11	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	89,135,814.00	84,010,000.00	94		
12	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	78,960,000.00	18,425,000.00	23		
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,926,338.00	1,152,000.00	59		
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,518,300.00	10,175,000.00	54		
15	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	32,393,400.00	22,432,000.00	69		
16	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,308,000.00	4,150,000.00	27		
17	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	72,000,000.00	51,500,000.00	71		
18	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3,962.00	0.00	0		
19	Belanja Sewa Bangunan	1,000,000.00	950,000.00	95		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi		Kendala	Langkah Penyelesaian
			RP	%		
1	2	3	4	5	6	7
	Gedung Tempat Pertemuan					
20	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,890,000.00	68,764,635.00	86		
21	Belanja bahan bakar dan pelumas	70,621,250.00	70,584,200.00	100		
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	788,832.00	690,000.00	87		
23	belanja natura dan pakan natura	16,170,000.00	16,140,000.00	100		
24	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	213,825,000.00	213,750,000.00	100		
25	Belanja jasa tenaga keamanan	337,500,000.00	337,500,000.00	100		
26	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	109,918,00	0,00	0		
27	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,985,000.00	52,826,900.00	86		
	Jumlah	2,999,509,000,00	2,436,688,272,00	81		

Sumber : BPBD Kabupaten Katingan, Tahun 2024



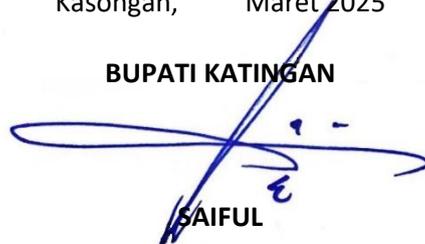
BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 secara garis besar dapat berjalan dengan baik walaupun terdapat permasalahan-permasalahan yang di hadapi terutama pada aspek kepemimpinan pemerintah dan keuangan pemerintah daerah, namun berkat kerjasama dengan berbagai pihak semua masalah tersebut dapat kita lalui dengan baik. Semoga laporan ini akan dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Katingan sepanjang Tahun 2024. Di samping itu kami juga berharap agar pada tahun-tahun mendatang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat lebih disempurnakan dan berjalan lebih baik lagi guna dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Katingan secara menyeluruh. Mudah-mudahan apa yang tertuang dalam Buku Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Katingan Tahun 2024 ini dapat memberi gambaran keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Dari seluruh upaya yang telah kita lakukan, akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua berserah diri diiringi doa dengan penuh harapan semoga apa yang telah kita lakukan selama Tahun Anggaran 2024 mendapat berkah dari-Nya, sehingga kita semua dapat membawa Kabupaten Katingan menjadi salah satu daerah yang berkembang maju pada tingkat nasional. Akhir kata atas kerjasama yang terjalin selama ini di ucapkan terima kasih. Wassalamu'alakum Wr.Wb.

Kasongan, Maret 2025

BUPATI KATINGAN



SAIFUL